Determinan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2015-2024

SKRIPSI



Oleh:

Nama : Renita Dwi Anjani

Nomor Mahasiswa : 21313100

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

2025

Determinan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2015-2024

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1
Program Studi Ekonomi Pembangunan
pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama	: Renita Dwi Anjani
Nomor Mahasiswa	: 21313100
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FBE UII Tahun 2023/2024. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 08 Agustus 2025

Penulis,



Renita Dwi Anjani

PENGESAHAN

Determinan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2015-2024

Oleh:

Nama	: Renita Dwi Anjani
NIM	: 2131300
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 08 Agustus 2025
Telah disetujui dan disahkan oleh,
Dosen Pembimbing



Prof. Jaka Sriyana S.E., M.Si., Ph.D.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Determinan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2015-2024

Disusun oleh : RENITA DWI ANJANI

Nomor Mahasiswa : 21313100

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Senin, 01 September 2025

Penguji/Pembimbing Skripsi : Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D.

Penguji : Aminuddin Anwar, SE.,M.Sc.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullohi Wabarakatuh

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesikan skripsi dengan judul "Determinan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2015-2024" untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa kelancaran dan keberhasilan selama ini adalah anugerah dari Allah SWT. Skripsi ini juga tidak akan mungkin selesai tanpa dukungan, bantuan, bimbingan, nasihat, dan motivasi dari seluruh pihak yang telah berkontribusi baik secara moril maupun material, untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepasa:

1. Allah SWT atas berkat Rahmat dan hidayah-Nya serta kesehatan yang dilimpahkan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
2. Kedua orangtua penulis yang telah memberikan dukungan baik moral atau materi, dan doa sampai saat ini serta kasih sayang yang tidak tergantikan.
3. Bapak Johan Arifin, S.E., M..Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Abdul Hakim S.E., M.Sc. Selaku Kepala Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
5. Prof. Jaka Sriyana S.E., M.Si., Ph.D. selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini atas arahan, bimbingan, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh bapak/ibu dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
7. Teman-teman Panci yaitu Gilda, Putri, Pau, Nadia, dan Ina yang selalu memberi semangat dan mendengarkan keluh kesah penulis selama ini.

8. Teman sedari SMP, Naura yang selalu membantu dan memotivasi dalam segala hal sampai saat ini.
9. Teman terdekat penulis sejak memasuki perkuliahaan hingga saat ini Ainy, Putri Wida, dan Oliv yang selalu menemani, memberikan dukungan, serta menjadi pendengar keluh kesah penulis dalam segala situasi.
10. Terakhir, penulis ingin berterima kasih kepada Mark Lee, NCT, dan SEVENTEEN atas karya-karya mereka yang selalu menemani dan memberi semangat selama proses penulisan ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalama yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan segala bentuk saran maupun masukan dari semua pihak yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan pikiran yang bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi Wabarokatuh

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ..... **ii**
PENGESAHAN ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **vii**
DAFTAR GAMBAR ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **x**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xi**
ABSTRAK ..... **xii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Landasan Teori 1
1.2 Rumusan Permasalahan 13
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 14
1.3.1 Tujuan Penelitian 14
1.3.2 Manfaat Penelitian 14
1.4 Sistematika Penelitian 15
BAB II KAJIAN PUSTAKA **16**
2.1 Landasan Teori 16
2.1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi 16
2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi 17
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah 18
2.1.4 Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 20
2.1.5 Dana Keistimewaan (DAIS) 21
2.1.6 Penanaman Modal Dalam Negeri 22
2.1.7 Penanaman Modal Asing 22
2.1.8 Jumlah Tenaga Kerja 23
2.2 Kajian Pustaka 23
2.2.1 Penelitian Terdahulu 23
2.3 Formulasi Hipotesis 27
2.3.1 Kerangka Penelitian 27
2.3.2 Pengembangan Hipotesis 27
BAB III METODE PENELITIAN **29**
3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data 30
3.2 Definisi Variabel Operasional 31
3.2.1 Variabel Independen 31
3.2.2 Variabel Independen 35
3.3 Metode Analisis 36
3.3.1 Teknik Analisis Regresi Linear Berganda 36

3.3.2 Pengujian Hipotesis 39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 41
4.1 Deskripsi Data Penelitian 41
4.2 Pemilihan Model Estimasi 41
4.2.1 Uji Chow 41
4.2.2 Uji Hausman 42
4.2.3 Uji LM 42
4.3 Model Regresi Common Effect 43
4.4 Uji Asumsi Klasik 43
4.4.1 Uji Normalitas 43
4.4.2 Uji Multikolinearitas 44
4.4.3 Uji Heterokedastisitas 44
4.5 Pengujian Hipotesis 45
4.5.1 Uji Signifikansi F (Uji Statistika F) 45
4.5.2 Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistika T) 46
4.5.3 Pengukuran Koefisien Determinasi (R^2) 48
4.6 Analisis Pembahasan 49
4.6.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 49
4.6.2 Pengaruh Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 50
4.6.3 Pengaruh Dana Keistimewaan (DAIS) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 51
4.6.4 Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 52
4.6.5 Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 53
4.6.6 Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 56
5.1 Kesimpulan 56
5.2 Saran 56
DAFTAR PUSTAKA 58
LAMPIRAN 63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 27

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas 43

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhuan Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015-2024 (miliar rupiah) 2
Tabel 1.2 Realisasi Pendapatan PAD, TKDD, dan Pendapatan Lainnya di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2015 – 2024 (Miliar Rupiah)..... 4
Tabel 1.3 Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2015-2024 (Miliar Rupiah) 8
Tabel 1.4 Realisiasi Anggaran Belanja Daerah Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2015-2024 (miliar rupiah)..... 11
Tabel 1.5 Jumlah Angkatan kerja menurut kab/kota di provinsi D.I Yogyakarta tahun 2015-2024..... 12

Tabel 4.1 Hasil Uji Chow..... 41
Tabel 4.2 Hasil Uji Hausman..... 42
Tabel 4.3 Hasil Uji LM..... 42
Tabel 4.4 Hasil Regresi Common Effect..... 43
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas 44
Tabel 4.6 Hasil Uji Heterokedastisitas..... 45
Tabel 4.7 Hasil Uji F-Statistik..... 45
Tabel 4.8 Hasil Uji T-Statistik..... 46
Tabel 4.9 Hasil Koefisien Determinasi 48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Data Penelitian 63
Lampiran 2: Common Effect 66
Lampiran 3: Uji Chow 67
Lampiran 4: Uji Hausman 68
Lampiran 5: Uji LM 69
Lampiran 6: Uji Multikolinearitas 69
Lampiran 7: Uji Heterokedastisitas 70
Lampiran 8: Uji Heterokedastisitas 70

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I. Yogyakarta) memiliki karakteristik khusus dalam struktur perekonomiannya, baik dari sisi fiskal, investasi, maupun ketenagakerjaan, termasuk adanya Dana Keistimewaan sebagai bentuk kewenangan khusus daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan serta pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), Dana Keistimewaan (DAIS), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), dan jumlah tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi D.I. Yogyakarta selama periode 2015–2024.

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data panel lima kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan pendekatan data panel. Pemilihan model estimasi dilakukan melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier (LM), yang menunjukkan bahwa model terbaik adalah *Common Effect Model*. Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan melalui uji F, uji t, dan koefisien determinasi (R^2).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan PAD, TKDD, DAIS, PMDN, PMA, dan jumlah tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi D.I. Yogyakarta. Secara parsial, beberapa variabel menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara variabel lainnya belum menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi D.I. Yogyakarta tidak hanya dipengaruhi oleh kapasitas fiskal daerah, tetapi juga oleh investasi dan kualitas tenaga kerja. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh Provinsi D.I. Yogyakarta.

Kata Kunci: *Pertumbuhan Ekonomi; Pendapatan Asli Daerah; Transfer ke Daerah dan Dana Desa; Dana Keistimewaan; Investasi; Tenaga Kerja.*

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Landasan Teori

Pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan kapasitas suatu negara dalam menyediakan barang dan jasa bagi masyarakatnya. Kemampuan ini berkembang berkat kemajuan teknologi, perbaikan kelembagaan, serta penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai tujuan ideal (Todaro & Smith, 2006). Pertumbuhan ekonomi menjadi dasar utama bagi tercapainya pembangunan berkelanjutan. Melalui pertumbuhan ekonomi, pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengutamakan pembangunan infrastruktur, memperbaiki layanan pendidikan dan kesehatan, menyediakan fasilitas yang mendukung investasi domestik dan asing, memulihkan kondisi lingkungan, serta memperkuat sektor pertanian (Saad & Kalakech, 2009).

Kesadaran akan kompleksitas dan tantangan dalam pembangunan serta pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa upaya ini tidak dapat sepenuhnya dikendalikan atau direncanakan hanya oleh pemerintah pusat. Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

PDRB atas harga konstan dapat menggambarkan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhuan Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015-2024 (miliar rupiah)

Kab./Kota	KulonProgo	Bantul	GunungKidul
2015	Rp6.281,90	Rp15.588,52	Rp11.152,36
2016	Rp6.580,68	Rp16.375,51	Rp11.696,16
2017	Rp6.973,41	Rp17.209,87	Rp12.281,56
2018	Rp7.728,41	Rp18.150,88	Rp12.914,94
2019	Rp8.770,75	Rp19.155,27	Rpz13.605,07
2020	Rp8.468,29	Rp18.839,37	Rp13.512,44
2021	Rp8.838,14	Rp19.781,89	Rp14.230,14
2022	Rp9.419,36	Rp20.809,22	Rp14.994,23
2023	Rp9.951,95	Rp21.861,77	Rp15.749,22
2024	Rp10.426,23	Rp22.964,66	Rp16.506,42

Sumber: BPS (Data Diolah)

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhuan Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015-2024 (miliar rupiah) (lanjutan)

Kab./Kota	Sleman	Kota Yogyakarta	Total
2015	Rp28.098,01	Rp22.393,01	**Rp83.513,80**
2016	Rp29.563,38	Rp23.536,29	**Rp87.752,02**
2017	Rp31.140,59	Rp24.768,43	**Rp92.373,86**
2018	Rp33.138,26	Rp26.127,22	**Rp98.059,71**
2019	Rp35.286,51	Rp27.685,29	**Rp104.502,89**
2020	Rp33.857,33	Rp27.016,50	**Rp101.693,93**
2021	Rp35.755,93	Rp27.409,76	**Rp106.015,86**
2022	Rp37.596,42	Rp29.863,00	**Rp112.682,23**
2023	Rp39.508,68	Rp31.378,80	**Rp118.450,42**
2024	Rp41.559,54	Rp32.964,35	**Rp124.421,20**

Sumber: BPS (Data Diolah)

Kabupaten Kulon Progo mencatat peningkatan PDRB selama 10 tahun dari Rp6.281,90 miliar (2015) menjadi Rp10.426,23 miliar (2024). Pertumbuhan ini relatif stabil, meskipun dampak pandemi pada tahun 2020 menyebabkan sedikit penurunan. Wilayah ini berpotensi tumbuh lebih cepat jika infrastruktur seperti Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong sektor pariwisata dan perdagangan. Pada 10 tahun terakhir Bantul memiliki

PDRB yang besar, dengan pertumbuhan signifikan dari Rp15.588,52 miliar (2015) menjadi Rp22.964,66 miliar (2023). Sektor unggulan di Bantul mencakup industri kreatif, kerajinan lokal, dan pariwisata berbasis alam. Bantul juga menjadi daerah penyangga Kota Yogyakarta, yang memperkuat kontribusinya terhadap ekonomi regional. Gunung Kidul menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang stabil, dengan PDRB meningkat dari Rp11.152,36 miliar (2015) menjadi Rp16.506,42 miliar (2024). Pertumbuhan ini dapat dikaitkan dengan pengembangan sektor pariwisata berbasis alam, seperti pantai dan goa, meskipun kontribusinya terhadap total PDRB provinsi masih relatif kecil dibandingkan daerah lainnya. Sebagai wilayah dengan PDRB tertinggi, Sleman mencatat kenaikan dari Rp28.098,01 miliar (2015) menjadi Rp41.559,54 miliar (2024). Sleman merupakan pusat pendidikan dengan banyak perguruan tinggi, serta memiliki sektor pariwisata yang berkembang pesat. Hal ini menjadikannya sebagai kontributor terbesar terhadap ekonomi Provinsi Yogyakarta. Kota Yogyakarta juga memiliki peran signifikan, dengan PDRB meningkat dari Rp22.393,01 miliar (2015) menjadi Rp32.964,35 miliar (2024). Kota ini merupakan pusat pemerintahan, pendidikan, dan jasa, dengan sektor pariwisata dan perdagangan sebagai penggerak utama. Kota Yogyakarta menunjukkan daya tahan yang kuat terhadap tantangan ekonomi, termasuk dampak pandemi.

Struktur APBD Provinsi D.I. Yogyakarta dapat dilihat dari dua sisi utama, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Dari sisi penerimaan, APBD didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), serta pendapatan lainnya yang mencerminkan kapasitas fiskal daerah (Anggoro, 2017). Pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari tiga komponen utama yang menjadi sumber pendanaan bagi pemerintah daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), serta pendapatan lainnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan potensi lokal melalui pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lainnya. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) merupakan alokasi dana dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah dan pemerataan antarwilayah. Sementara itu, pendapatan lainnya mencakup sumber pendapatan lain di luar PAD dan TKDD, yang turut memberikan kontribusi terhadap pembiayaan program pembangunan daerah.

Ketiga komponen ini memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara dari sisi pengeluaran, realisasi anggaran belanja daerah termasuk Dana Keistimewaan (DAIS) menunjukkan bagaimana alokasi fiskal diarahkan untuk membiayai pembangunan, layanan publik, dan kewenangan khusus DIY (Kholik, 2022). Dengan demikian, analisis APBD dari kedua sisi ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kemampuan fiskal daerah sekaligus prioritas kebijakan pembangunan di Provinsi D.I. Yogyakarta.

Tabel 1.2 Realisasi Pendapatan PAD, TKDD, dan Pendapatan Lainnya di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2015 – 2024 (Miliar Rupiah)

Kab./ Kota	**Kulon Progo**			**Bantul**		
APBD	**PAD**	**TKDD**	**Pendapatan Lainnya**	**PAD**	**TKDD**	**Pendapatan Lainnya**
2015	Rp170,82	Rp730,00	Rp326,65	Rp390,62	Rp1.041,84	Rp518,76
2016	Rp180,27	Rp1.057,30	Rp120,50	Rp404,45	Rp1.431,27	Rp164,61
2017	Rp249,69	Rp993,22	Rp182,19	Rp494,18	Rp1.418,95	Rp173,75
2018	Rp211,05	Rp1.112,50	Rp236,29	Rp462,65	Rp1.468,78	Rp296,32
2019	Rp237,88	Rp1.198,89	Rp235,50	Rp505,93	Rp1.512,81	Rp250,80
2020	Rp254,42	Rp1.018,06	Rp309,95	Rp479,61	Rp1.352,14	Rp273,09
2021	Rp307,15	Rp1.139,96	Rp182,61	Rp491,67	Rp1.394,23	Rp349,75
2022	Rp308,16	Rp1.045,39	Rp176,68	Rp540,57	Rp1.469,25	Rp250,75
2023	Rp324,05	Rp1.148,57	Rp223,38	Rp587,44	Rp1.541,17	Rp287,48
2024	Rp329,33	Rp1.018,89	Rp197,06	Rp602,89	Rp1.662,84	Rp216,88

Sumber: DJPK Kemenkeu (Data Diolah)

Tabel 1.2 Realisasi Pendapatan PAD, TKDD, dan Pendapatan Lainnya di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2015 – 2024 (Miliar Rupiah) (lanjutan)

Kab./ Kota	Gunung Kidul			Sleman		
APBD	**PAD**	**TKDD**	**Pendapatan Lainnya**	**PAD**	**TKDD**	**Pendapatan Lainnya**
2015	Rp196,10	Rp978,31	Rp424,60	Rp643,13	Rp1.052,11	Rp599,38
2016	Rp206,28	Rp1.344,95	Rp103,11	Rp717,15	Rp1.389,68	Rp222,27
2017	Rp271,37	Rp1.411,41	Rp164,32	Rp825,64	Rp1.469,02	Rp320,86
2018	Rp226,98	Rp1.391,37	Rp232,54	Rp894,27	Rp1.501,41	Rp317,12
2019	Rp254,81	Rp1.518,31	Rp339,94	Rp972,05	Rp1.542,25	Rp326,34
2020	Rp228,21	Rp1.298,90	Rp265,27	Rp788,25	Rp1.345,44	Rp407,37
2021	Rp236,37	Rp1.519,73	Rp163,67	Rp803,68	Rp1.514,15	Rp475,50
2022	Rp313,52	Rp1.474,38	Rp200,78	Rp1.061,06	Rp1.550,23	Rp394,69
2023	Rp277,32	Rp1.503,03	Rp211,82	Rp2.260,32	Rp3.145,62	Rp761,29
2024	Rp261,33	Rp1.375,22	Rp155,18	Rp1.088,44	Rp1.553,24	Rp296,86

Sumber: DJPK Kemenkeu (Data Diolah)

Tabel 1.2 Realisasi Pendapatan PAD, TKDD, dan Pendapatan Lainnya di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2015 – 2024 (Miliar Rupiah) (lanjutan)

Kab./ Kota	Kota Yogyakarta			Total
APBD	**PAD**	**TKDD**	**Pendapatan Lainnya**	
2015	Rp510,55	Rp652,75	Rp270,71	Rp8.506,33
2016	Rp540,50	Rp915,86	Rp121,32	Rp8.919,52
2017	Rp657,05	Rp871,36	Rp130,87	Rp9.633,88
2018	Rp667,49	Rp910,21	Rp159,22	Rp10.088,20
2019	Rp689,05	Rp911,07	Rp165,64	Rp10.661,27
2020	Rp563,17	Rp902,22	Rp234,36	Rp9.720,46
2021	Rp598,12	Rp884,85	Rp224,30	Rp10.285,74
2022	Rp725,58	Rp968,20	Rp196,14	Rp10.675,38
2023	Rp1.610,69	Rp1.897,86	Rp493,14	Rp16.273,18
2024	Rp768,47	Rp883,01	Rp207,84	Rp10.617,48

Sumber: DJPK Kemenkeu (Data Diolah)

Tabel yang disajikan menggambarkan perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lima kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam kurun waktu 2015 hingga 2024. Data ini meliputi tiga komponen utama pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah dan Dana Desa

(TKDD), serta pendapatan lainnya. Kabupaten dan kota yang dicakup dalam tabel ini adalah Kulon Progo, Bantul, Gunungkidul, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Dari data tersebut, kita dapat melihat dinamika pengelolaan keuangan daerah yang beragam di setiap wilayah, mencerminkan perbedaan kapasitas fiskal serta potensi ekonomi masing-masing kabupaten/kota.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen penting dalam APBD, karena menunjukkan sejauh mana suatu daerah mampu memanfaatkan potensi lokal sebagai sumber pendapatan. PAD mencakup pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan sumber lain yang sah. Dalam tabel tersebut terlihat bahwa PAD setiap kabupaten/kota mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Misalnya, Kabupaten Sleman, yang memiliki PAD tertinggi, mencatat peningkatan signifikan dari Rp643,13 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp2.260,32 miliar pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan keberhasilan Kabupaten Sleman dalam mengoptimalkan potensi lokalnya, baik melalui pajak maupun retribusi. Di sisi lain, Kabupaten Kulon Progo memiliki PAD yang relatif lebih kecil, yakni Rp170,82 miliar pada tahun 2015 yang meningkat menjadi Rp329,33 miliar pada tahun 2024 dalam kurun waktu 10 tahun. Perbedaan ini mencerminkan ketimpangan kapasitas ekonomi antar kabupaten/kota, di mana wilayah seperti Sleman memiliki basis ekonomi yang lebih kuat dibandingkan Kulon Progo.

Komponen kedua dalam APBD adalah Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD), yang merupakan dana yang ditransfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. TKDD meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa, yang menjadi sumber pendapatan utama bagi daerah-daerah dengan kapasitas fiskal terbatas. Besaran dana transfer dari pemerintah pusat ke kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta tidak ditentukan secara merata, tetapi dihitung berdasarkan pertimbangkan berbagai indikator fiskal dan sosial-ekonomi. Pada Dana Alokasi Umum (DAU), faktor-faktor seperti jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, kondisi geografis, serta kapasitas fiskal daerah menjadi dasar utama perhitungan (Setiya, et al., 2021). Kabupaten dengan PAD rendah seperti Gunungkidul dan Kulon Progo cenderung memperoleh alokasi DAU yang lebih besar dibandingkan Sleman atau Kota Yogyakarta yang memiliki kapasitas fiskal lebih kuat.

Data dalam tabel menunjukkan bahwa TKDD menjadi penyumbang terbesar dalam struktur pendapatan daerah, terutama di wilayah seperti Kulon Progo dan Gunungkidul yang PAD-nya masih relatif rendah. Sebagai contoh, pada tahun 2019, TKDD Kulon Progo mencapai Rp1.198,89 miliar, jauh lebih besar dibandingkan PAD-nya yang hanya Rp237,88 miliar. Hal ini mengindikasikan ketergantungan daerah tersebut terhadap dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk membiayai berbagai program pembangunan.

Selain PAD dan TKDD, tabel ini juga mencakup komponen pendapatan lainnya, yang mencakup sumber pendapatan lain di luar PAD dan TKDD, seperti hibah atau hasil kerja sama antar daerah. Pendapatan lainnya menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan di beberapa wilayah. Misalnya, Kabupaten Gunungkidul mengalami penurunan pada tahun 2021, dengan nilai Rp163,67 miliar, sebelum kembali meningkat menjadi Rp211,82 miliar pada tahun 2023. Fluktuasi ini bisa mencerminkan adanya dinamika dalam penerimaan hibah atau kerja sama antar daerah, yang mungkin dipengaruhi oleh prioritas program atau kebijakan pada tingkat lokal maupun nasional.

Dalam teori ekonomi makro, dari sisi pengeluaran, pendapatan regional bruto dihitung sebagai total dari berbagai variabel, salah satunya adalah investasi. Investasi mengacu pada penanaman modal di suatu perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan barang modal dan perlengkapan produksi yang sudah ada, sehingga dapat meningkatkan jumlah produksi (Agus, 2014). Investasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu investasi pemerintah dan investasi swasta. Investasi pemerintah mengacu pada alokasi dana atau modal yang berasal dari sumber pemerintah, sedangkan investasi swasta adalah pengalokasian dana atau modal yang berasal dari sektor swasta. Investasi swasta ini kemudian dibagi lagi menjadi dua kategori, yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Tingginya penanaman modal, baik dari investor lokal maupun asing, menjadi salah satu indikator bahwa suatu negara memiliki sistem perekonomian yang baik. Hal ini didukung oleh keberadaan sumber daya yang memadai, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kondisi tersebut mampu menarik minat investor untuk berinvestasi, yang pada akhirnya memberikan dampak positif tidak hanya bagi negara secara keseluruhan, tetapi juga bagi setiap daerah. Beberapa manfaatnya meliputi

terciptanya lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, serta percepatan pembangunan di tingkat pusat maupun daerah (Pujoalwanto, 2014).

Tabel 1.3 Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2015-2024 (Miliar Rupiah)

Kab./Kota	**Kulon Progo**		**Bantul**		**Gunung Kidul**	
Investasi	**PMDN**	**PMA**	**PMDN**	**PMA**	**PMDN**	**PMA**
2015	Rp494,70	Rp562,48	Rp268,01	Rp343,26	Rp35,50	Rp136,08
2016	Rp523,95	Rp562,77	Rp308,25	Rp435,04	Rp43,85	Rp140,64
2017	Rp568,62	Rp635,33	Rp345,33	Rp537,65	Rp97,08	Rp147,84
2018	Rp50.937,78	Rp688,74	Rp409,82	Rp622,21	Rp110,73	Rp149,20
2019	Rp9.948,56	Rp702,84	Rp520,62	Rp642,29	Rp161,60	Rp176,73
2020	Rp786,40	Rp731,55	Rp552,05	Rp668,36	Rp192,86	Rp177,38
2021	Rp12.286,81	Rp737,75	Rp652,09	Rp680,99	Rp480,61	Rp180,24
2022	Rp321,44	Rp1.002,03	Rp397,61	Rp179,19	Rp132,52	Rp25,31
2023	Rp35,68	Rp206,70	Rp133,86	Rp533,44	Rp5,18	Rp187,08
2024	Rp170,02	Rp22,00	Rp605,01	Rp122,11	Rp58,76	Rp24,86

Sumber: BPS (Data Diolah)

Tabel 1.3 Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2015-2024 (Miliar Rupiah) (lanjutan)

Kab./Kota	**Sleman**		**Kota Yogyakarta**	
Investasi	**PMDN**	**PMA**	**PMDN**	**PMA**
2015	Rp1.431,04	Rp3.009,70	Rp1.722,41	Rp3.220,22
2016	Rp1.831,97	Rp3.112,54	Rp1.814,80	Rp3.303,85
2017	Rp1.930,83	Rp3.283,86	Rp1.875,58	Rp3.431,85
2018	Rp3.364,30	Rp3.367,62	Rp190,53	Rp4.298,74
2019	Rp4.159,52	Rp3.474,80	Rp2.457,70	Rp4.349,30
2020	Rp4.710,52	Rp3.548,00	Rp2.689,56	Rp4.360,67
2021	Rp6.478,69	Rp3.700,35	Rp2.794,45	Rp4.504,25
2022	Rp1.092,77	Rp139,50	Rp330,67	Rp288,34
2023	Rp235,33	Rp3.412,66	Rp270,87	Rp655,61
2024	Rp2.030,20	Rp261,24	Rp766,26	Rp101,44

Sumber: BPS (Data Diolah)

Tabel ini menggambarkan realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di lima kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selama periode 2015-2024. Data tersebut mencerminkan perkembangan aktivitas investasi serta daya tarik masing-masing wilayah terhadap investor domestik dan asing.

Distribusi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi D.I. Yogyakarta sangat dipengaruhi oleh potensi dan karakteristik ekonomi masing-masing kabupaten/kota. Sleman dan Kota Yogyakarta menjadi tujuan utama investasi karena memiliki daya tarik yang kuat di sektor pendidikan, perdagangan, jasa, dan pariwisata modern (Pujoalwanto, 2014). Kedua wilayah ini mampu menarik minat investor asing (PMA) dalam jumlah signifikan, khususnya di bidang hotel, restoran, properti, dan pendidikan internasional (Bakari, 2018).

Sleman menunjukkan investasi yang signifikan, dengan PMDN mencapai puncak Rp6.478,68 miliar pada 2021 meskipun turun pada 2023 dan Kembali meningkat pada 2024 mencapai Rp2.030,20, sementara PMA terus memberikan kontribusi besar, mencapai Rp3.412,66 miliar pada tahun 2023. Kota Yogyakarta sebagai ibu kota provinsi menunjukkan dominasi PMA, dengan angka tertinggi Rp4.504,25 miliar pada 2021, meskipun menurun ke Rp101,44 miliar pada 2024, sementara PMDN tetap stabil tetapi nilainya lebih kecil dibandingkan PMA.

Sementara itu, Bantul dan Gunungkidul cenderung menarik investasi PMDN dengan basis sektor pariwisata alam dan industri kreatif, meskipun nilai investasinya relatif lebih kecil dibandingkan Sleman dan Kota Yogyakarta. Kulon Progo, meski memiliki angka investasi yang fluktuatif, mulai menunjukkan potensi baru sejak beroperasinya Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), yang membuka peluang di sektor transportasi, perdagangan, dan logistik (Adi & Syahlina, 2020).

Kulon Progo mengalami penurunan tajam dalam realisasi PMDN, dari Rp9.948,56 miliar pada 2019 menjadi hanya Rp35,68 miliar pada 2023, sementara PMA relatif lebih stabil meskipun nilainya lebih kecil. Bantul menunjukkan tren investasi yang cenderung stabil, dengan penurunan PMDN menjadi Rp133,86 miliar pada 2023 kemudian terjadi peningkatan menjadi Rp605,01 pada 2024 dan fluktuasi PMA yang mencapai puncaknya sebesar Rp680,99 miliar pada 2021. Gunungkidul mencatat angka

investasi paling kecil di DIY, dengan PMDN yang sempat meningkat hingga Rp480,61 miliar pada 2021, tetapi kemudian turun drastis menjadi Rp5,18 miliar pada 2023, sedangkan PMA tetap kecil dan tidak konsisten.

Secara keseluruhan, Sleman dan Kota Yogyakarta menjadi pusat utama investasi di DIY, sementara kabupaten lain seperti Gunungkidul, Kulon Progo, dan Bantul menghadapi tantangan dalam mempertahankan investasi.

Pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dijelaskan bahwa kewenangan keistimewaan berada pada Tingkat provinsi. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang yang sama menyatakan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kewenangan sebagai daerah otonom sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah dan urusan keistimewaan, yang meliputi : (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) kelembagaan pemerintahan DIY; (3) pelestarian dan pengembangan kebudayaan; (4) pengelolaan pertanahan; serta (5) penataan ruang wilayah (Hasim, 2016).

Provinsi D.I Yogyakarta sebagai daerah khusus memiliki dana khusus yang biasa disebut Dana Keistimewaan. Dana keistimewaan D.I Yogyakarta adalah dana yang berasal dari APBN yang digunakan untuk mendanai kewenangan istimewa. Dana Keistimewaan merupakan bagian dari dana transfer ke daerah dan dana desa. Untuk mendukung Pembangunan ekonomi yang terus maju, diperlukan berbagai kegiatan yang inovatif dan solutif serta sinegritas antar Masyarakat dan pemerintah daerah. Karena setiap daerah memiliki kondisi geografis, sosial, dan ekonomi yang berbeda, maka potensi Pembangunan pun tidak seragam. Perbedaan tersebut menjadi faktor penting dalam perumusan kebijakan Pembangunan. Oleh karena itu, perencanaan Pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan spesifik masin-masing daerah. Sebagai Gambaran, berikut disajikan data realisasi anggaran lima kabupaten/kota di provinsi D.I Yogyakarta selama 10 tahun terakhir, yaitu periode 2015-2024.

Tabel 1.4 Realisiasi Anggaran Belanja Daerah Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2015-2024 (miliar rupiah)

Kab./Kota	Kulon Progo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Kota Yogyakarta	Total
2015	Rp1.243,07	Rp1.933,30	Rp1.586,00	Rp2.328,75	Rp1.539,70	Rp8.630,82
2016	Rp1.406,49	Rp2.016,54	Rp1.651,55	Rp2.455,45	Rp1.665,42	Rp9.195,45
2017	Rp1.430,46	Rp2.076,74	Rp1.860,23	Rp2.489,60	Rp1.484,92	Rp9.341,95
2018	Rp1.481,01	Rp2.165,65	Rp1.772,31	Rp2.580,09	Rp1.652,73	Rp9.651,79
2019	Rp1.671,66	Rp2.283,59	Rp2.132,22	Rp2.777,00	Rp1.734,59	Rp10.599,06
2020	Rp1.500,04	Rp2.093,72	Rp1.775,06	Rp2.532,17	Rp1.517,60	Rp9.418,59
2021	Rp1.499,99	Rp2.226,59	Rp1.918,21	Rp2.714,31	Rp1.691,97	Rp10.051,07
2022	Rp1.531,20	Rp2.272,47	Rp2.006,45	Rp3.040,47	Rp1.826,80	Rp10.677,39
2023	Rp1.587,74	Rp2.237,15	Rp1.868,12	Rp2.922,67	Rp1.853,32	Rp10.469,00
2024	Rp1.641,81	Rp2.476,23	Rp1.891,61	Rp3.035,09	Rp1.918,93	Rp10.963,67

Sumber: BPS (Data Diolah)

Tabel ini menggambarkan realisasi anggaran belanja daerah atau dana keistimewaan di lima kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selama periode 2015-2024. Data tersebut mencerminkan perkembangan aktivitas perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan ekonomi dengan disesuikan kondisi dan kebutuhan spesifik masin-masing daerah.

Kulon progo menunjukkan tren peningkatan sebesar Rp1.243,07 pada tahun 2015 menjadi Rp1.641,81 pada tahun 2024. Meskipun sempat turun pada tahun 2020, tren secara umum tetap menunjukan pertumbuhan stabil yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat layanan publik dan Pembangunan infrastruktur terutama pasca beroperasinya bandara international Yogyakarta (YIA). Sedangkan Kabupaten Gunungkidul menunjukkan dinamika anggaran yang cukup fluktuatif namun tetap mengalami peningkatan dalam jangka panjang, dari Rp1.586,00 miliar pada 2015 menjadi Rp1.891,61 miliar pada 2024. Tahun 2019 menjadi puncak realisasi sebelum menurun pada masa pandemi.

Kabupaten Bantul secara konsisten mencatat anggaran belanja yang besar, meningkat dari Rp1.933,30 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp2.476,23 miliar pada tahun 2025. Kabupaten Sleman merupakan daerah dengan anggaran belanja terbesar di provinsi ini, meningkat dari Rp2.328,75 miliar (2015) menjadi Rp3.035,09 miliar (2024). Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pendidikan, perdagangan, dan

pariwisata, Sleman memiliki kapasitas fiskal yang kuat untuk mendukung berbagai program pembangunan. Lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2022 seiring dengan pulihnya ekonomi pascapandemi, yang mendorong percepatan pembangunan daerah.

Kota Yogyakarta menunjukkan realisasi anggaran yang stabil dan terus meningkat, dari Rp1.539,70 miliar (2015) menjadi Rp1.918,93 miliar (2024). Sebagai pusat administrasi dan jasa di provinsi, Kota Yogyakarta mengalokasikan belanja daerah untuk mendukung pelayanan publik, pengembangan sektor pariwisata, pendidikan, dan kebudayaan.

Tenaga kerja memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan tenaga kerja yang memadai, output ekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB) dapat meningkat. Dalam proses produksi, tenaga kerja dianggap sebagai faktor yang paling penting. Selain itu, dengan bertambahnya angkatan kerja, jumlah pekerja yang dapat mengisi berbagai sektor produksi juga meningkat. Oleh karena itu, keberadaan tenaga kerja sangat penting dan memiliki peran vital dalam pembangunan ekonomi (Ramayani, 2012).

Salah satu variabel makroekonomi yang krusial dalam menentukan pertumbuhan ekonomi adalah jumlah tenaga kerja. Tingginya jumlah tenaga kerja dinilai dapat mendorong output produktif, namun tanpa perbaikan produktivitas, penambahan tenaga kerja bisa saja berdampak sebaliknya, yaitu menurunnya pertumbuhan ekonomi (Fitriani, 2018).

Tabel 1.5 Jumlah Angkatan kerja menurut kab/kota di provinsi D.I Yogyakarta tahun 2015-2024

Kab./Kota	Kulon Progo	Bantul	Gunung Kidul	Sleman	Kota Yogyakarta	Total
2015	232.190	495.235	386.458	567.286	210.049	**1.891.218**
2016						**2.042.400**
2017	239.542	541.512	422.391	636.132	213.591	**2.053.168**
2018	249.186	561.731	437.238	645.596	224.641	**2.118.392**
2019	252.018	561.529	439.564	649.763	231.876	**2.134.750**
2020	259.421	585.160	389.444	667.823	224.468	**2.126.316**
2021	259.044	571.268	458.886	701.123	238.202	**2.228.523**

Sumber: BPS (Data Diolah)

Data jumlah Angkatan kerja di provinsi D.I Yogyakarta dari tahun 2015 sampai dengan 2024 menunjukkan tren yang relatif meningkat dengan beberapa fluktuasi di Tingkat kabupaten/kota. Sleman secara konsisten mencatat jumlah Angkatan kerja tertinggi disbanding kabupaten/kota lainnya. Pada tahun 2015 tercatat 567.286 jiwa kemudian meningkat menjadi 656.481 jiwa pada tahun 2024. Hal ini mencerminka Sleman sebagai daerah penyangga kota Yogyakarta dengan daya tarik ekonomi dan lapangan kerja yang kuat, khususnya di sektor Pendidikan, perdagangan, dan jasa.

Bantul juga mengalami peningkatan signifikan, dari 495.235 jiwa pada 2015 menjadi 585.625 jiwa pada tahun 2025. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2022, kemudian jumlahnya kembali meningkat di tahun berikutnya. Gunungkidul menunjukkan pertumbuhan Angkatan kerja yang cukup dinamis, dari 386.458 jiwa pada tahun 2015 kemudian terjadi penurunan yang cukup tajam pada tahun 2020 sebesar 389.444 jiwa akibat dampak dari COVID-19, namun pulih kembali di tahun-tahun berikutnya menjadi 461.326 jiwa pada tahun 2024.

Kulon progo mencatat peningkatan yang konsisten terus meningkat setiap tahunnya pada tahun 2015 sebesar 232.190 jiwa kemudian terus meningkat hingga pada tahun 2024 menjadi sebesar 275.589 jiwa. Kota Yogyakarta menunjukan pertumbuhan yang fluktuatif. Pada 2015 sebesar 210.049 jiwa kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 224.468 jiwa akibat dari COVID-19, pada tahun berikutnya terus mengalami peningkatan terutama pada tahun 2024 menjadi sebesar 479.337 jiwa.

1.2 Rumusan Permasalahan

Dalam melakukan penelitian terdapat beberapa rumusan masalah dari penelitian yang perlu dilakukan, antara lain:

1. Bagaimanakah perkembangan pendapatan asli daerah, transfer ke daerah dan dana desa, dana keistimewaan, penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, dan jumlah tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2015-2024.
2. Bagaimanakah pengaruh pendapatan asli daerah, transfer ke daerah dan dana desa, dana keistimewaan, penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, dan jumlah tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2015-2024.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka dirumuskan tujuan dan manfaat:

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk berikut.

1. Mengetahui dan menganalisis perkembangan pendapatan asli daerah, transfer ke daerah dan dana desa, dana keistimewaan, penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, dan jumlah tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2015-2024.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, transfer ke daerah dan dana desa, dana keistimewaan, penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, dan jumlah tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2015-2024.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini manfaat yang diharapkan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan memperkaya informasi terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), dana keistimewaan, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), serta Jumlah Tenaga Kerja dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi D.I. Yogyakarta selama periode 2015-2024. Melalui kajian ini, diharapkan pula akan terungkap dinamika dari masing-masing variabel tersebut, termasuk bagaimana kontribusi dan pengaruhnya terhadap perkembangan ekonomi di wilayah ini. Informasi yang dihasilkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mendorong atau menghambat pertumbuhan ekonomi di Provinsi D.I. Yogyakarta, serta pola hubungan antara kebijakan fiskal dan investasi dengan pembangunan ekonomi daerah.

Selain itu, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan strategis bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk

meningkatkan pendapatan asli daerah, memperkuat manajemen dana transfer, serta mengoptimalkan investasi domestik dan asing demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi baru bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan terkait pertumbuhan ekonomi di Provinsi D.I. Yogyakarta, sehingga mampu mendorong terciptanya kesejahteraan ekonomi bagi masyarat.

1.4 Sistematika Penelitian

Penelitian ini disusun dengan sistematika Bab yang terdiri dari Bab I pendahuluan, Bab II Kajian Pustaka dan Landasan Teori, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Analisis dan Pembahasan, serta Bab V Kesimpulan dan Implikasi.

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan Latar Belakang Masalah Penelitian, Rumusan Masalah Penelitian, Tujuan dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Menguraikan Kajian Pustaka, Landasan Teori, hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, dan mencoba menarik suatu Hipotesis Penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan Variabel Penelitian dan Definisi Operasional, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, serta Metode Analisis Data.

BAB IV : HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Menguraikan Analisis Deskriptif dan Objek Penelitian, Analisis Data, Pengujian Hipotesis, dan Pembahasan

BAB V : KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Menguraikan Kesimpulan dan Implikasi serta Masukan dari Hasil Penelitian

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan produksi barang dan jasa oleh masyarakat, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga berfungsi sebagai indikator untuk mengukur tingkat perkembangan dan kemajuan ekonomi dari satu periode ke periode berikutnya. Secara umum, kemampuan suatu perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa mencerminkan keberhasilan pertumbuhan ekonominya (Sukirno, 2011). Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan kapasitas jangka panjang suatu negara dalam menyediakan berbagai barang ekonomi bagi penduduknya. Kemampuan yang meningkat ini didorong oleh perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan lainnya (Todaro & Smith, 2006).

Pertumbuhan ekonomi merujuk pada proses peningkatan output per kapita dalam jangka panjang, dengan penekanan pada tiga komponen utama: proses, output per kapita, dan perspektif jangka panjang. Ide ini menunjukkan bagaimana perekonomian berkembang dari waktu ke waktu, dengan menekankan aspek dinamis dalam pertumbuhan dan perubahan ekonomi tersebut (Adisasmita, 2013).

Rostow, melalui pendekatan historis terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara di seluruh dunia, mengemukakan model tahap pertumbuhan ekonomi. Ia membagi proses pertumbuhan ekonomi menjadi lima tahap. Setiap negara atau wilayah dapat dimasukkan ke dalam salah satu tahap tersebut. Rostow menekankan pentingnya meningkatkan penanaman modal produktif dari 5% menjadi 10% dari produksi nasional neto untuk mencapai tahap lepas landas, di mana perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (self-sustained growth). Tahap ini adalah tahap di mana perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Kenaikan investasi ini dianggap sebagai kunci agar perekonomian dapat tumbuh melampaui laju pertumbuhan penduduknya (Todaro & Smith, 2006).

Salah satu indikator utama untuk mengevaluasi kinerja ekonomi baik di tingkat nasional maupun regional adalah pertumbuhan ekonomi. Secara umum, pertumbuhan

ekonomi mengacu pada peningkatan total output agregat, yang dihasilkan melalui aktivitas ekonomi, atau yang dikenal sebagai PDB. PDB sendiri merupakan total nilai dari seluruh akhir yang dihasilkan dalam wilayah, baik oleh penduduk lokal maupun penduduk asing yang tinggal di negara tersebut. Oleh karena itu, ukuran yang umum digunakan untuk menilai pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah persentase perubahan PDB di tingkat nasional dan persentase perubahan PDRB di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota (Hasan & Azis, 2018).

Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa pengukuran pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan mengacu pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara umum, PDRB dibagi menjadi dua jenis:

1) PDRB atas Dasar Harga Berlaku PDRB ini mencakup total nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada setiap tahun. Angka ini digunakan untuk menggambarkan perubahan dan struktur ekonomi, serta menunjukkan potensi sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah.
2) PDRB atas Dasar Harga Konstan PDRB ini dihitung berdasarkan nilai tambah barang dan jasa menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar. Data ini digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah secara keseluruhan atau per sektor dari satu periode ke periode berikutnya.

2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Berikut merupakan teori pertumbuhan ekonomi yang menyatakan bahwa pemerintah memiliki peran yang penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

1) Teori Pertumbuhan Keynesian

Keynes berpendapat bahwa aktivitas ekonomi di suatu wilayah bergantung pada sisi permintaan, yaitu pada pengeluaran total yang dilakukan oleh ekonomi pada titik waktu tertentu. Pengeluaran total yang digunakan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode disebut sebagai pengeluaran agregat. Meskipun demikian, pengeluaran ini tidak selalu mencapai tingkat penuh tenaga kerja. Akibatnya, pemerintah harus campur tangan untuk mengubah pengeluaran agregat agar perekonomian berjalan dengan baik.Konsumsi rumah tangga, investasi swasta,

pengeluaran pemerintah, dan ekspor netto membentuk total pengeluaran. Dalam penelitian ini, ada korelasi kuat antara pengeluaran agregat dan pertumbuhan ekonomi; lebih khusus lagi, pengeluaran pemerintah merupakan komponen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2011).

2) Teori Harrod-Domar

Setiap perekonomian perlu menyisihkan sebagian dari pendapatan nasionalnya untuk menabung, setidaknya untuk menggantikan barang-barang modal seperti bangunan, peralatan, dan material yang telah usang atau rusak. Namun, agar perekonomian dapat terus berkembang, diperlukan investasi baru yang menjadi penambahan bersih terhadap stok modal yang ada. Jika diasumsikan terdapat hubungan langsung antara total stok modal (K) dan total PDB (Y)—misalnya, jika diperlukan modal sebesar $3 untuk menghasilkan aliran PDB tahunan sebesar $1—maka setiap penambahan bersih pada stok modal melalui investasi baru akan menyebabkan peningkatan dalam aliran output nasional, yaitu PDB (Todaro & Smith, 2006).

Investasi memiliki pengaruh penting terhadap permintaan agregat dengan menciptakan pendapatan, serta terhadap penawaran agregat melalui peningkatan kapasitas produksi. Selama investasi netto terus berlangsung, pendapatan dan output akan terus bertumbuh. Untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, investasi perlu terus ditingkatkan. Dengan demikian, peningkatan pendapatan akan memastikan penggunaan penuh kapasitas produksi dari stok modal yang dihasilkan (Subandi, 2019).

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang mendukung pembiayaan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, sesuai dengan prinsip desentralisasi. PAD menitikberatkan pada optimalisasi kinerja dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, serta pendapatan lain yang sesuai dengan ketentuan hukum (Badrudin, 2011).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya lokal, pelaksanaan fungsi pemerintahan, dan penyediaan layanan kepada masyarakat di daerah tersebut. PAD berfungsi sebagai sumber

pendapatan utama yang digunakan untuk mendanai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kemampuan suatu daerah untuk mengoptimalkan PAD sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Jumlah PAD yang dapat dihasilkan berkorelasi positif dengan tingkat pembangunan di wilayah tersebut (Anggoro, 2017).

Berdasarkan tujuan tersebut, PAD dapat dianggap sebagai sumber utama pendapatan daerah yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah melaksanakan pembangunan sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Akibatnya, semakin tinggi penerimaan PAD di suatu daerah, semakin cepat pembangunan dapat dilakukan disana (Nasir, 2019).

Menurut Pasal 6 Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, Pendapatan Asli Daerah meliputi: Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak, retribusi, perusahaan milik, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan (Nasir, 2019). Pendapatan daerah yang sah terdiri dari pendapatan dari sumbangan pemerintah, sumbangan lain yang diatur oleh undang-undang:

1) Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 8 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan "pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dikeluarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah Pembangunan daerah"

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah, selain pajak daerah, memiliki peran krusial dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi ini merupakan salah satu bentuk pendapatan yang diterima pemerintah daerah sebagai imbalan langsung atas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi dijelaskan sebagai pungutan resmi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pembayaran atas

penggunaan jasa atau izin tertentu yang secara khusus disediakan untuk kebutuhan individu atau badan usaha.

3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang Dipisahkan

Sumber Kontribusi pemerintah daerah dari laba BUMD dibuat dengan tujuan menciptakan lapangan kerja dan mendukung pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, BUMD juga memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi sumber pendapatan daerah, yang menjadikannya sumber penerimaan PAD lainnya yang memiliki peran penting setelah pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 33, pendapatan yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup beberapa sumber, yaitu: (a) pendapatan dari laba perusahaan daerah; (b) pendapatan dari laba lembaga keuangan perbankan; (c) pendapatan dari laba lembaga keuangan non-perbankan; serta (d) pendapatan yang diperoleh melalui laba hasil investasi atau penyertaan modal.

4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan daerah sebagian besar berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pembiayaan belanja rutin serta pembangunan daerah. PAD berperan sebagai sumber dana untuk memasukkan penerimaan sebesar-besarnya ke kas daerah guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menggunakan layanan tersebut. Untuk mewujudkan hal ini, terdapat badan atau lembaga yang bertugas mengatur dan mengelola sumber-sumber PAD tersebut.

2.1.4 Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) merupakan salah satu komponen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). TKDD berfungsi sebagai elemen desentralisasi fiskal yang langsung dikelola oleh pemerintah pusat. TKDD merupakan bentuk dari sistem dana transfer yang menjadi bagian dari kerangka desain desentralisasi fiskal di Indonesia (Setiya, et al., 2021). Berdasarkan Undang-Undang APBN 2020 (UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020), transfer ke daerah diartikan sebagai bagian dari belanja

negara yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui berbagai mekanisme pendanaan berupa:

1) Dana perimbangan
2) Dana insentif daerah
3) Dana otonomi khusus; dan
4) Dana keistimewaan daerah

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) adalah bagian integral dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mendukung desentralisasi fiskal di Indonesia. Dikelola langsung oleh pemerintah pusat, TKDD terdiri dari berbagai jenis dana yang bertujuan untuk mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal, termasuk dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dan dana keistimewaan daerah. Dengan mekanisme ini, TKDD berfungsi untuk memastikan pemerataan pembangunan dan memberikan kewenangan kepada daerah dalam pengelolaan sumber daya dan pembangunan daerah masing-masing.

2.1.5 Dana Keistimewaan (DAIS)

Dana Keistimewaan merupakan dana yang didapat dari bagian anggaran untuk Daerah Istimewa Yogyakarta yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaa kewenangan keistimewaan. Dana ini termasuk dalam kategori belanja transfer pada bagian transfer keuangan daerah sebagai bukti pengakuan negara terhadap status keistimewaan yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta (Kholik, 2022).

Pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dijelaskan bahwa kewenangan keistimewaan berada pada Tingkat provinsi. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang yang sama menyatakan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kewenangan sebagai daerah otonom sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah dan urusan keistimewaan, yang meliputi : (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) kelembagaan pemerintahan DIY; (3) pelestarian dan pengembangan kebudayaan; (4) pengelolaan pertanahan; serta (5) penataan ruang wilayah (Hasim, 2016).

2.1.6 Penanaman Modal Dalam Negeri

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan jenis investasi yang memiliki peran strategis dalam perekonomian suatu negara karena berkontribusi signifikan terhadap pencapaian pembangunan ekonomi (Bakari, 2018). Menurut (Asiyan, 2013) Manfaat dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) antara lain: (a) membantu mengurangi penggunaan devisa; (b) mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri; (c) mendorong perkembangan industri domestik melalui hubungan keterkaitan hulu dan hilir; serta (d) berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja lokal.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi suatu negara. Selain menjadi elemen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, PMDN memberikan berbagai manfaat, seperti mengurangi penggunaan devisa, menekan ketergantungan pada produk asing, memajukan industri domestik melalui konektivitas hulu-hilir, serta menciptakan peluang kerja bagi masyarakat lokal. Dengan manfaat tersebut, PMDN berkontribusi besar terhadap peningkatan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan nasional.

2.1.7 Penanaman Modal Asing

Melakukan bisnis di wilayah negara melalui penanaman modal oleh pemerintah asing, badan usaha asing, individu warga negara asing, atau badan hukum asing dengan modal yang dimiliki oleh negara asing. Ini juga mencakup individu, badan usaha asing, badan hukum asing, atau badan hukum Indonesia dengan modal asing sebagian atau sepenuhnya (Adi & Syahlina, 2020).

Pada dasarnya, pembangunan ekonomi didukung oleh Penanaman Modal Asing (PMA). PMA adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam jangka panjang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan standar hidup masyarakat (Mankiw, 2003).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ini dilakukan melalui penanaman modal oleh pemerintah asing, badan

usaha asing, atau individu warga negara asing, baik sepenuhnya menggunakan modal asing atau bekerja sama dengan penanam modal dalam negeri. Dengan demikian, PMA berkontribusi pada peningkatan standar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

2.1.8 Jumlah Tenaga Kerja

Tenaga kerja akan terus bertambah seiring dengan perkembangan penduduk dan pendidikan disuatu wilayah. Perkembangan penduduk yang selaras dengan peningkatan pendidikan menjadi salah satu indikator penting dalam pertumbuhan ekonomi (Astuti, Hidayat, & Darwin, 2017). Jumlah tenaga kerja yang lebih besar mengindikasikan peningkatan jumlah produksi, dan peningkatan jumlah penduduk mengindikasikan pertambahan pasar domestik. Hal tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang bergantung pada kemampuan sistem perekonomian serta produktivitas suatu wilayah (52)

Jumlah tenaga kerja sebagai salah satu indikator pertumbuhan ekonomi juga disebabkan karena tenaga kerja merupakan sumber daya potensial bagi suatu wilayah untuk menggerakan dan melaksanakan pembangunan wilayah yang dapat meningkatkan wilayah tersebut (Widayanti, Laut, & Destiningsih, 2019). Disamping itu. Peningkatan tenaga kerja yang berlebih tanpa diselaraskan dengan penambahan lapangan usaha dapat meningkatkan jumlah pengangguran di suatu wilayah yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi suatu wilayah (Swastika, 2024). Maka dari itu, dalam rangka meningkatkan ekonomi suatu wilayah dibutuhkan pula efisiensi pada proses produksi (Kuncoro, 2003).

2.2 Kajian Pustaka

2.2.1 Penelitian Terdahulu

(Ihsan, 2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Pembiayaan terhadap petumbuhan ekonomi di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Untuk mengetahui besar pengaruhnya antara variabel independen dengan variabel dependen dipergunakan metode persamaan Regresi Linier Berganda.Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dan Dana Pembiayaan. Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lombok Timur, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Timur tidak dipengaruhi oleh PAD atau dana pembiayaan secara bersamaan.

(Salsabila, 2024) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bulukumba dengan tujuan mengetahui apakah ada pengaruh secara parsial antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap petumbuhan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi linear sederhana dimana data yang diperoleh merupakan data sekunder. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil penelitian ini memberikan bukti bawa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan parsial terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan Tingkat signifikansi yang mendukung Kesimpulan tersebut.

(Supiyanti, 2023) melakukan penelitian tentang Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Belanja Modal, dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah variabel independen Penanaman Modal Dalam Negeri, Belanja Modal, dan Penanaman Modal Asing berpengaruh terhadap variabel dependen pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode Analisis Regresi Linear Berganda, dengan menggunakan uji Ordinary Least Squares (OLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanaman modal dalam negeri (X1) berpengaruh positif dan tidak positif terhadap pertumbuhan ekonomi: X2 berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi; X3 berdampak positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

(Shafwah & Zakaria, 2019) melakukan penelitian tentang Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar Tahun 2008-2015. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk pengetahui Pengaruh Inflasi, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linear Berganda, uji-F dan uji-t. Hasil yang diperoleh penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi memiliki efek positif pada

pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak signifikan. Penanaman modal asing menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Makassar dari tahun 2008 hingga 2017 tidak signifikan dan negatif.

(Mulyani, Sudarman, & Astuti, 2021) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur periode 2001-2020. Data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana. Berdasarkan hasil penelitian ini dari pengujian hipotesis dengan melakukan uji t dan memperoleh nilai nilai. Maka secara parsial variabel pendapatan asli daerah (X) berpengartuh signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (Y). Selain itu semakin tinggi pendapatan asli daerah maka pertumbuhan ekonomi meningkat. Peningkatan PAD diperlukan dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki, agar dapat membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada APBD.Analisis Regresi Linear Sederhana.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengukur pengaruh PAD, TKDD, dan Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mengidentifikasi hubungan antara PAD, TKDD, dan Belanja Modal dengan pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data yang digunakan mencakup laporan keuangan daerah dan data ekonomi dari tahun terakhir yang tersedia. Berdasarkan hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa PAD tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi; TKDD berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja modal tidak memiliki dampak yang signifikan (Putra, Pratiwi, Al-Sakinnah, & Safari, 2024).

(Wahyuni, 2020) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta. Data dalam penelitian ini bersumber dari data Laporan Realisasi APBD Kota Surakarta triwulanan 2011-2018 dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh signifikan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pad Kota Surakarra. Artinya, PAD yang dihadilkan

oleh pemerintah daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Dana alokasi umum juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kota Surakarta. Artinya, semakin besar pengalokasian realisasi DAU yang diberikan pemerintah pusat, semakin lambat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Ini karena DAU tidak digunakan secara keseluruhan untuk meningkatkan ekonomi daerah.

(Al Akbar, 2022) Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh dari Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten. Penelitian ini dilakukan pada periode tahun 2017 sampai 2020. Metode analisis yang digunakan dalam penilitian ini adalah Analisis Regresi Linear Berganda. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa penanaman modal asing memiliki hubunga yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun memilki hubungan yang positif namun secara statistik tidak signifikan. Penanaman modal dalam negeri memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi; variabel PMDN memengaruhi pertumbuhan ekonomi Banten secara parsial dan signifikan.

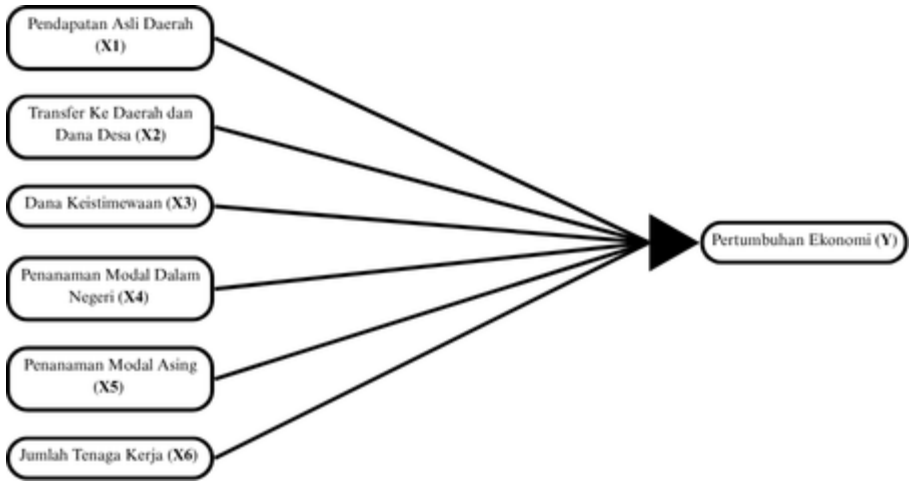
(Rahmi, 2023) penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada periode tahun 2019 hingga 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi data panel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini mencakup 34 provinsi di Indonesia, sehingga memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap perbedaan karakteristik ekonomi antarwilayah. Berdasarkan hasil penelitian didaptkan bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia: PAD dan PDRB positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi..

(Aji, 2021) Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah terdapat pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi D.I. Yogyakarta. Metode Analisis ekonometrika dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Penanaman Modal Asing (PMA) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Penanaman Modal Dalam Negeri memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi, dan variabel Angkatan Kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.3 Formulasi Hipotesis

2.3.1 Kerangka Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

Sumber: Diolah Penulis

2.3.2 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah tanggapan sementara atau penjelasan tentang perilaku fenomena dan gejala masalah. Hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sesuai dengan landasan teori dan kerangka pemikiran yang sudah disebutkan sebelumnya. Berdasarkan landasan teori, kajian empiris, dan kerangka pemikiran yang dibahas dalam penelitian ini, hipotesis ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

2) Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
3) Dana keistimewaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
4) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
5) Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
6) Jumlah tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), Dana keistimewaan, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), dan Jumlah tenaga kerja secara simultan mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi.

BAB III
METODE PENELITIAN

Penelitian ini difokuskan pada Provinsi D.I. Yogyakarta, salah satu daerah istimewa di Indonesia yang dikenal dengan daya tarik budaya, sejarah, dan pariwisata, serta memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Sebagai daerah otonom, D.I. Yogyakarta mengelola sumber pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), serta Dana keistimewaan. Selain itu, wilayah ini juga menarik banyak investasi dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), yang secara langsung berdampak pada pertumbuhan ekonominya dan peningkatan jumlah tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja yang meningkat ini mencerminkan peran penting investasi dan kebijakan fiskal daerah.

Provinsi D.I. Yogyakarta mencatat fluktuasi pertumbuhan ekonomi selama periode 2015-2024. Tahun 2020 menjadi titik balik akibat dampak pandemi COVID-19, yang mengakibatkan penurunan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk pariwisata, perdagangan, dan investasi. Kendati demikian, D.I. Yogyakarta berhasil menunjukkan pemulihan ekonomi yang bertahap pada tahun-tahun berikutnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi masing-masing variabel ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi D.I. Yogyakarta selama lima tahun terakhir. Data yang digunakan mencakup lima variabel utama, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD): Merepresentasikan kemandirian daerah dalam menghasilkan pendapatan melalui pengelolaan sumber daya lokal.
2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD): Dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan daerah.
3. Dana keistimewaan: Sumber pendapatan di luar PAD dan TKDD, termasuk hibah dan bantuan darurat.
4. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN): Investasi domestik yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam negeri.
5. Penanaman Modal Asing (PMA): Investasi dari pihak asing yang beroperasi di wilayah ini.

6. Jumlah Tenaga Kerja : Total jumlah individu yang bekerja atau aktif dalam kegiatan ekonomi.

3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Data pada penelitian yang digunakan yakni data sekunder (Dhyatmika, 2013). berpendapat bahwa data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan kemudian didistribusikan kepada masyarakat, yang merupakan pengguna data. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari 5 kabupaten/kota di Provinsi DIY dari tahun 2015 hingga 2024. Di antaranya, data berikut dipergunakan:

1. Pertumbuhan Ekonomi (PDRB atas Harga Konstan Provinsi D.I. Yogyakarta menurut Kabupaten/Kota) periode 2015-2024.
2. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta periode tahun 2015-2024.
3. Transfer ke Daerah dan Dana Desa Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta periode tahun 2015-2024.
4. Dana keistimewaan Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta periode tahun 2015-2024.
5. Penanaman Modal Dalam Negeri Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta periode tahun 2015-2024.
6. Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta periode tahun 2015-2024.

Data pada penelitian yang digunakan yakni data sekunder. (Dhyatmika, 2013) berpendapat bahwa data sekunder yakni data yang telah dilakukan pengumpulan dimana pengumpulan data ini dilakukan lembaga pengumpul data, serta data ini selanjutnya akan dipublikasikan kepada pengguna data yakni Masyarakat. Didalam penelitian, ini data yang dipakai data dalam kurun waktu 5 tahun dimulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2024, yang terdiri dari 5 Kabupaten/Kota Provinsi D.I. Yogyakarta. Diantaranya data dipergunakan berikut:

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data yang telah dikumpulkan sebelumnya dan dapat diakses melalui publikasi dan informasi data serta laporan dari instansi terkait. Penelitian ini menggunakan data dari lima

Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama jangka waktu lima tahun, yang dimulai pada tahun 2015 hingga 2024. Sumber data penelitian ini adalah:

1. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta.
2. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia

3.2 Definisi Variabel Operasional

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian ini menuggunakan angka untuk penrhitungan statistic. Pendekatan kuantitatif adalah metode atau pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data kuantitatif. Metode ini mengukur fenomena, menemukan pola, dan menguji hipotesis. Berlandaskan sifat positivisme metode ini dianggap metode ilmiah yang memenuhi standar ilmiah yang objektif, konkrit, rasional, terukur, dan sistematis (Aulia & Yulianti, 2019).

Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis yang telah dibangun untuk memeriksa populasi atau sampel tertentu. Selain itu, alat penelitian digunakan untuk mengumpulkan data dan menganalisisnya secara kuantitatif atau statistik. Untuk mengukur pengaruh realisasi PAD, TKDD, dana keistimewaan, PMDN, PMA, dan Jumlah tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, peneliti menerapkan metode penelitian kuantitatif. Ini sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya.

Variabel dapat didefinisikan seabgai atribut seseorang, atau obyek, yang mempunyai "variasi" anatara satu orang dengan yang lain atau satu obyek dengan obyek lain. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan terdiri atas dua jenis, yaitu variabel terikat (dependen) dan variabel bebas (independen), bab sebelumnya.

3.2.1 Variabel Independen

Variabel ini sering dikenal dengan istilah variabel stimulus, prediktor, atau antecedent, dan dalam bahasa Indonesia disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas

merupakan variabel yang memiliki peran sebagai faktor yang memengaruhi, menyebabkan, atau menjadi alasan terjadinya perubahan maupun munculnya variabel terikat (dependen) (Kuantitatif, 2016). Adapun variabel independen dalam penelitain ini, yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1), Transfer ke Daerah dan Dana Desa (X2), Dana keistimewaan (X3), Penanaman Modal Dalam Negeri (X4), Penanaman Modal Asing (X5) dan Jumlah tenaga kerja (X6).

1. Pendapatan Asli Daerah (X1)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang mendukung pembiayaan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, sesuai dengan prinsip desentralisasi. PAD menitikberatkan pada optimalisasi kinerja dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, serta pendapatan lain yang sesuai dengan ketentuan hukum (Badrudin, 2011).

(Nasir, 2019) Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 6 bahwa Pendapatan Asli Daerah meliputi: Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan lain-lain. Pendapatan daerah yang sah pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah yang terdiri sumbangan dari pemerintah, Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan pendaptan lain-lain yang sah, yaitu:

a) Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 8 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan "pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dikeluarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah Pembangunan daerah"

b) Retribusi Daerah

Selain pajak daerah, retribusi daerah juga memiliki peran signifikan dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi daerah merupakan salah satu bentuk penerimaan daerah yang dipungut sebagai imbalan langsung atas layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

retribusi didefinisikan sebagai pungutan daerah yang dikenakan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang secara khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan.

c) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang Dipisahkan

Sumber penerimaan PAD lainnya yang memiliki peran penting setelah pajak daerah dan retribusi daerah adalah kontribusi pemerintah daerah dari laba BUMD. BUMD didirikan dengan tujuan menciptakan lapangan kerja dan mendukung pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, BUMD juga berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi salah satu sumber pendapatan bagi daerah. Menurut Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 33, pendapatan yang termasuk dalam hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi: (a) bagian laba dari perusahaan milik daerah, (b) bagian laba dari lembaga keuangan bank, (c) bagian laba dari lembaga keuangan non-bank, dan (d) bagian laba dari penyertaan modal atau investasi.

d) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan daerah sebagian besar berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pembiayaan belanja rutin serta pembangunan daerah. PAD berperan sebagai sumber dana untuk memasukkan penerimaan sebesar-besarnya ke kas daerah guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menggunakan layanan tersebut. Untuk mewujudkan hal ini, terdapat badan atau lembaga yang bertugas mengatur dan mengelola sumber-sumber PAD tersebut.

2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (X2)

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) merupakan salah satu komponen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). TKDD berfungsi sebagai elemen desentralisasi fiskal yang langsung dikelola oleh pemerintah pusat. TKDD merupakan bentuk dari sistem dana transfer yang menjadi bagian dari kerangka desain desentralisasi fiskal di Indonesia (Juwari, Susilowati, & Sitinjak, 2021). Berdasarkan Undang-Undang APBN 2020 (UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020), transfer ke daerah diartikan

sebagai bagian dari belanja negara yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui berbagai mekanisme pendanaan berupa:

a) Dana perimbangan
b) Dana insentif daerah
c) Dana otonomi khusus; dan
d) Dana keistimewaan daerah

3. Dana keistimewaan (X3)

Provinsi D.I Yogyakarta sebagai daerah khusus memiliki dana khusus yang biasa disebut Dana Keistimewaan. Dana keistimewaan D.I Yogyakarta adalah dana yang berasal dari APBN yg digunakan untuk mendanai kewenangan istimewa. Dana Keistimewaan merupakan bagian dari dana transfer ke daerah dan dana desa. Untuk mendukung Pembangunan ekonomi yang terus maju, diperlukan berbagai kegiatan yang inovatif dan solutif serta sinegritas antar Masyarakat dan pemerintah daerah. Karena setiap daerah memiliki kondisi geografis, sosial, dan ekonomi yang berbeda, maka potensi Pembangunan pun tidak seragam. Perbedaan tersebut menjadi faktor penting dalam perumusan kebijakan Pembangunan. Oleh karena itu, perencanaan Pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan spesifik masin-masing daerah.

4. Penanaman Modal Dalam Negeri (X4)

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan jenis investasi yang memiliki peran strategis dalam perekonomian suatu negara karena berkontribusi signifikan terhadap pencapaian pembangunan ekonomi (Bakari, 2018). Menurut (Asiyan, 2013) Manfaat dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) antara lain: (a) membantu mengurangi penggunaan devisa; (b) mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri; (c) mendorong perkembangan industri domestik melalui hubungan keterkaitan hulu dan hilir; serta (d) berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja lokal.

5. Penanaman Modal Asing (X5)

Melakukan kegiatan usaha di wilayah negara melalui penanaman modal oleh pemerintah asing, badan usaha asing, atau individu warga negara asing, yang berasal dari modal yang dimiliki oleh negara asing, baik sepenuhnya menggunakan modal asing

maupun bekerja sama dengan penanam modal dalam negeri. Hal ini juga mencakup individu warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing (Adi & Syahlina, 2020).

6. Jumlah Tenaga Kerja (X6)

Tenaga kerja memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan adanya tenaga kerja yang memadai, output ekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB) dapat meningkat. Dalam proses produksi, tenaga kerja dianggap sebagai faktor yang paling penting. Selain itu, dengan bertambahnya angkatan kerja, jumlah pekerja yang dapat mengisi berbagai sektor produksi juga meningkat. Oleh karena itu, keberadaan tenaga kerja sangat penting dan memiliki peran vital dalam pembangunan ekonomi (Ramayanti, 2012).

3.2.2 Variabel Independen

Variabel ini dikenal sebagai variabel output, kriteria, atau konsekuen, dan dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi hasil dari keberadaan dan pengaruh variabel bebas (Sugiyono, 2016). Adapun variabel terikat dalam penelitian ini, yaitu Pertumbuhan Ekonomi (Y).

1. Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan produksi barang dan jasa oleh masyarakat, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga berfungsi sebagai indikator untuk mengukur tingkat perkembangan dan kemajuan ekonomi dari satu periode ke periode berikutnya. Secara umum, kemampuan suatu perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa mencerminkan keberhasilan pertumbuhan ekonominya (Sukirno, 2011). Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan kapasitas jangka panjang suatu negara dalam menyediakan berbagai barang ekonomi bagi penduduknya. Kemampuan yang meningkat ini didorong oleh perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan lainnya (Todaro & Smith, 2006).

Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa pengukuran pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan mengacu pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara umum, PDRB dibagi menjadi dua jenis:

1. PDRB atas Dasar Harga Berlaku PDRB ini mencakup total nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada setiap tahun. Angka ini digunakan untuk menggambarkan perubahan dan struktur ekonomi, serta menunjukkan potensi sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah.
2. PDRB atas Dasar Harga Konstan PDRB ini dihitung berdasarkan nilai tambah barang dan jasa menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar. Data ini digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah secara keseluruhan atau per sektor dari satu periode ke periode berikutnya.

3.3 Metode Analisis

3.3.1 Teknik Analisis Regresi Linear Berganda

Model penelitian menggunakan analisis regresi linear berganda yang menghubungkan variabel independen dengan variabel dependen dapat dirumuskan sebagai berikut:

Model Penelitian

$$\mathbf{Y=\beta0+\beta1X1+\beta2X2+\beta3X3+\beta4X4+\beta5X5+\ \beta6X6+\varepsilon Y}$$

Keterangan Model

- Y: Pertumbuhan Ekonomi (variabel dependen), diukur sebagai persentase perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan.
- X_1: Pendapatan Asli Daerah (PAD), diukur dalam satuan miliar rupiah.
- X_2: Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), diukur dalam satuan miliar rupiah.
- X_3: Dana keistimewaan, diukur dalam satuan miliar rupiah.
- X_4: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), diukur dalam satuan miliar rupiah.
- X_5: Penanaman Modal Asing (PMA), diukur dalam satuan miliar rupiah.

- X_6: Jumlah Tenaga Kerja, diukur dalam satuan jiwa.
- β_0: Konstanta, nilai Y ketika semua variabel independen bernilai nol.
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6$: Koefisien regresi, yang menunjukkan besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.
- ε: Error term, yaitu variabel lain yang memengaruhi Y tetapi tidak dimasukkan dalam model

1. Model Regresi Data

a. Uji Statistic F (Uji Chow)

Uji ini bertujuan untuk menentukan apakah model Pooled Least Square atau Fixed Effect yang lebih tepat digunakan dalam mengestimasi regresi data panel. Hipotesis yang diuji adalah:

H0 : Pooled Least Square

H1 : Fixed Effect Model

H0 akan ditolak jika P-value lebih kecil dari nilai alpha, sedangkan H0 diterima jika P-value lebih besar dari nilai alpha. Nilai alpha yang digunakan dalam pengujian ini adalah 5%.

b. Uji Hausman

Pengujian ini bertujuan untuk membandingkan model fixed effect dengan random effect dalam memilih model regresi data panel yang paling sesuai. Hausman test menggunakan perangkat lunak yang sama dengan Chow test, yaitu Stata. Hipotesis yang diuji dalam Hausman test adalah:

H0 : Random Effect Model

H1 : Fixed Effect Model

H0 akan ditolak jika P-value lebih kecil dari nilai alpha, sedangkan H0 diterima jika P-value lebih besar dari nilai alpha. Nilai alpha yang digunakan dalam pengujian ini adalah 5%.

c. Uji Lagrange multiple (LM)

Uji ini bertujuan untuk menentukan apakah model Random Effect lebih tepat digunakan dibandingkan dengan metode Pooled Least Square. Uji LM ini mengacu pada distribusi chi-square dengan derajat kebebasan yang sesuai dengan jumlah variabel independen. Hipotesis yang diuji adalah:

H0 : Pooled Least Square

H1 : Random Effect Model

H0 ditolak jika P-value lebih kecil dari nilai alpha, dan diterima jika P-value lebih besar dari nilai alpha. Nilai alpha yang digunakan dalam pengujian ini adalah 5%

2. Uji Asumsi Klasik

Agar model yang dianalisis memiliki tingkat akurasi yang baik, diperlukan pengujian asumsi klasik. Pengujian ini penting karena data yang digunakan dalam analisis regresi data panel harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam regresi tersebut. Beberapa uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah distribusi residual dalam model regresi mengikuti distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki residual yang terdistribusi normal. Untuk mengidentifikasi apakah residual terdistribusi normal, dapat dilakukan dengan menganalisis grafik dan uji statistik. Salah satu pengujian normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Jarque-Bera (Ghozali, 2006).

Hipotesis yang diuji adalah:

H0 : Data terdistribusi normal

H1 : Data terdistribusi tidak normal

Uji statistik yang digunakan adalah Uji Jarque-Bera (JB) dengan tingkat signifikansi 5%. H0 ditolak jika nilai JB kurang dari 0,005, dan H1 diterima jika nilai JB lebih besar dari 0,05.

b. Uji Multikolinearitas

Uji ini memeriksa apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2006). Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dalam regresi, dapat digunakan nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan sejauh mana setiap variabel independen dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Kriteria pengambilan keputusan berdasarkan nilai tolerance dan adalah sebagai berikut:

- Jika nilai tolerance lebih besar atau sama dengan 0,10 atau nilai VIF kurang dari atau sama dengan 10, maka tidak ada multikolinearitas.
- Jika nilai tolerance kurang dari atau sama dengan 0,10 atau nilai VIF lebih besar dari 10, maka terdapat multikolinearitas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk memeriksa apakah terdapat hubungan antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) dalam model regresi linear. Model regresi yang baik seharusnya bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2006). Untuk menguji adanya autokorelasi, dapat digunakan uji Durbin Watson (DW), dengan pedoman sebagai berikut:

- Jika angka D-W di bawah -2, berarti terdapat autokorelasi positif.
- Jika angka D-W berada di antara -2 hingga 2, berarti tidak ada autokorelasi.
- Jika angka D-W di atas 2, berarti terdapat autokorelasi negatif.

d. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan variansi residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam model regresi. Jika variansi residual tetap konsisten antara pengamatan, maka Jika variansi residual tetap konsisten, hal ini disebut homoskedastisitas, sedangkan jika variansi residual bervariasi, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang ideal adalah yang menunjukkan homoskedastisitas, yaitu tidak adanya heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

Heteroskedastisitas dapat dianalisis dengan menggunakan uji Breusch Pagan dan uji Glejser. Hipotesis pada uji heteroskedastisitas sebagai berikut:

H_0 = Homokedastisitas

H_1 = Heteroskedastisitas

Apabila hasil uji hetersokedastisitas memiliki probabilitas lebih bebas dari pada alpha sebesar 5% maka data tersebut gagal menolak H_0 sehingga model regresi pada data tersebut dalam kondisi homokedastisitas atau tidak memiliki masalah heteroskedastisitas.

3.3.2 Pengujian Hipotesis

1. Uji Signifikansi F (Uji Statistik F).

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah variabel-variabel independen secara keseluruhan mempengaruhi variabel dependen dalam persamaan regresi. Keputusan diambil berdasarkan nilai probabilitas (signifikansi); jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

2. Uji signifikan parsial (Uji Statistik t)

Uji ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana setiap variabel independen secara terpisah dapat menjelaskan variasi pada variabel dependen (Ghozali, 2006). Uji t dilakukan dengan memeriksa nilai probabilitas signifikansi t untuk setiap variabel yang muncul dalam hasil regresi. Jika nilai probabilitas signifikansi t kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3. Pengukuran Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap perubahan variabel dependen. Dengan uji ini, dapat dipahami seberapa banyak variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nilai koefisien determinasi (R^2) berkisar antara 0 (nol) hingga 1 (satu). Nilai R^2 yang kecil menunjukkan bahwa variabel independen memiliki kemampuan yang terbatas dalam menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen hampir sepenuhnya menjelaskan variasi dalam variabel dependen (Ghozali, 2006).

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi D.I Yogyakarta yang terdiri dari 5 Kabupaten/Kota. Periode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari Tahun 2015-2024. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan memanfaatkan analisis regresi linear berganda. Variabel dependen berupa Pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dari data distribusi PDRB ADHK setiap tahunnya, sedangkan variabel independent yang dianalisis antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), Dana Keistimewaan (DAIS), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), dan Tenaga Kerja (TK). Data-data tersebut dihimpun melalui data resmi statistik BPS Provinsi D.I. Yogyakarta kemudian dianalisis melalui software eviews 12.

4.2 Pemilihan Model Estimasi

4.2.1 Uji Chow

Untuk memilih model yg tepat untuk estimasi akhir dalam Uji Chow yaitu antara *common effect* atau *fixed effect*. Hipotesis dari uji chow ini adalah sebagai berikut:

H_0 = *Common Effect*

H_1 = *Fixed Effect*

Tabel 4.1 Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F	1.188657	(9,34)	0.3335
Cross-section Chi-square	13.678316	9	0.1342

Sumber: Diolah Dengan eviews 12

Table 4.1 menunjukkan hasil dari pengujian dengan uji chow untuk memilih model antara common effect atau fixed effect. Hasil dari uji tersebut dapat dilihat dari probabilitas yang menunjukkan nilai 0.3335 sehingga lebih kecil dari alpha sebesar

5% atau 0.05. Artinya uji tersebut gagal menolah H_0 sehingga model terbaik dari uji chow adalah *common effect model*.

4.2.2 Uji Hausman

Uji hausman dilakukan untuk memilih model yg tepat untuk estimasi akhir yaitu antara *random effect* atau *fixed effect*. Hipotesis dari uji chow ini adalah sebagai berikut :

H_0 = *Random Effect*

H_1 = *Fixed Effect*

Tabel 4.2 Hasil Uji Hausman

Effect Test	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f	Prob.
Cross-section random	10.266520	6	0.1139

Sumber: Diolah Dengan eviews 12

Berdasarkan hasil dari 4.2 diperoleh hasil uji hausman yang memiliki nilai probabilitas 0.1139 sehingga probabilitas lebih besar dari alpha sebesar 5% atau 0.05. Artinya uji tersebut gagal menolak H_0 sehingga model yang tepat dan terbaik untuk penelitian ini adalah *random effect mode*.

4.2.3 Uji LM

Uji LM digunakan untuk menentukan model estimasi yang paling sesuai, yaitu dengan membandingkan antara model common effect dan modek random effect. Adapun hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah Sebagai berikut :

H_0 = *Common Effect*

H_1 = *Random Effect*

Tabel 4.3 Hasil Uji LM

Effect Test	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	6.16E-05 (0.9937)	60.95192 (0.0000)	60.95198 (0.0000)

Sumber: Diolah Dengan eviews 12

Berdasarkan hasil uji LM pada table 4.3 diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.9937, yang lebih besar dari Tingkat signifikansi sebesar alpha 5% atau 0.05. dengan

demikian gagal menolak H_0, yang berarti model common effect dianggap lebih baik digunakan dalam penelitian ini.

4.3 Model Regresi Common Effect

Tabel 4.4 Hasil Regresi Common Effect

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	101.3492	3212.597	0.031547	0.9750
PAD	18.05359	2.273770	7.939936	0.0000
TKDD	-12.28629	1.800738	-6.822921	0.0000
DAIS	12.36650	3.167850	3.903751	0.0003
PMDN	-0.049520	0.054878	-0.902360	0.3719
PMA	0.902754	0.333266	2.708810	0.0097
TK	0.001969	0.007540	0.261118	0.7952

Sumber: Diolah Dengan eviews 12

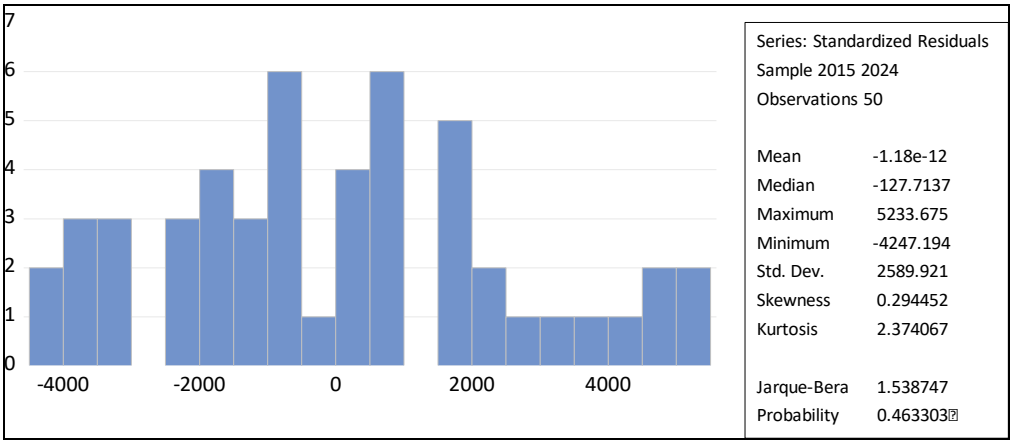
Persamaan Regresi:

Pertumbuhan Ekonomi =

101.3492 + 18.05359 PAD - 12.28629 TKDD + 12.36650 DAIS - 0.049520 PMDA + 0.902754 PMA + 0.001969 TK

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas



Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas

Sumber: Diolah Dengan eviews 12

Berdasarkan hasil uji normalitas di atas diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.463303 > alpha (α) 5% (0,05), sehingga gagal menolak Ho. Artinya dapat disimpulkan bahwa sebaran data berdistribusi normal.

4.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah uji untuk mengetahui adanya hubungan linier yang sempurna di antara variabel yang menjelaskan model regresi. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas pada model regresi dapat dilihat dari koefisien korelasi antara masing-masing variabel independent. Koefisien bebas dari multikolinearitas apabila kurang dari 0.80.

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas

Correlation						
Variabel	**PAD**	**TKDD**	**DAIS**	**PMDN**	**PMA**	**TK**
PAD	1.000000	0.638012	0.637027	-0.106426	0.423604	0.356900
TKDD	0.638012	1.000000	0.677229	-0.091349	-0.088867	0.603929
DAIS	0.637027	0.677229	1.000000	-0.131662	0.146209	0.899004
PMDN	-0.106426	-0.091349	-0.131662	1.000000	0.046338	-0.158060
PMA	0.423604	-0.088867	0.146209	0.046338	1.000000	-0.027076
TK	0.356900	0.603929	0.899004	-0.158060	-0.027076	1.000000

Sumber: Diolah Dengan eviews 12

Berdasarkan table 4.4.2 dapat dilihat hasil uji multikolinearitas pada model regresi penelitian ini. Dapat dilihat koefisien korelasi hubungan dari variabel independent pada penelitian ini tidak lebih atau lebih kecil dari 0.80 sehingga model regresi penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas.

4.4.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji suatu model regresi apakah terjadi ketidaksamaan variasi dari suatu residual pada satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Pada penelitian ini karena model regresi berbentuk common effect, maka uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan metode uji glejser.

Hipotesis dari uji heteroskedastisitas sebagai berikut :

H_0 = Homokedastisitas

H_1 = Heteroskedastisitas

Tabel 4.6 Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Probabilitas
PAD	0.0855
TKDD	0.2877
DAIS	0.1873
PMDN	0.1995
PMA	0.0593
TK	0.5774

Sumber: Diolah Dengan eviews 12

Berdasarkan tabel 4.4.4 dapat dilihat uji heterokedastisitas dengan metode glejser. Probabilitas variabel independen penelitian ini Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), Dana Keistimewaan (DAIS), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), dan Tenaga Kerja (TK) memiliki nilai lebih dari alpha sebesar 5% atau 0.05, sehingga gagal menolak H_0. Artinya model regresi pada penelitian ini bersifat homokedastisitas atau terhindar dari masalah heteroskedastisitas.

4.5 Pengujian Hipotesis

4.5.1 Uji Signifikansi F (Uji Statistika F)

Uji F ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), Dana Keistimewaan (DAIS), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), dan Tenaga Kerja (TK) secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi di D.I Yogyakarta tahun 2015-2024.

H_0 = tidak berpengaruh signifikan

H_1 = berpengaruh signifikan

Tabel 4.7 Hasil Uji F-Statistik

Variabel	Prob (F-statistic)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0.000000
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)	
Dana Keistimewaan (DAIS)	
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	

Penanaman Modal Asing (PMA)	
Tenaga Kerja (TK)	

Sumber: Diolah Dengan eviews 12

Berdasarkan tabel 4.5 maka hasil dari probabilitas uji F penelitian ini sebesar 0.000000. artinya nilai probabilitas lebih kecil dari alpha sebesar 5% sehingga hasilnya adalah menolah H_0. Jadi variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), Dana Keistimewaan (DAIS), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), dan Tenaga Kerja (TK) secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di D.I Yogyakarta.

4.5.2 Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistika T)

Uji t atau uji parsial dilakukan untuk mengetahui dari masing-masing satu variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), Dana Keistimewaan (DAIS), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), dan Tenaga Kerja (TK) secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi di D.I Yogyakarta tahun 2015-2024.

Hipotesis dari uji t ini adalah sebagai berikut :

$H_0 = \beta 1 = 0$ (tidak berpengaruh)

$H_1 = \beta 1 \neq 0$ (berpengaruh)

Tabel 4.8 Hasil Uji T-Statistik

Variabel	Koefisien	Probabilitas	Keterangan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	18.05359	0.0000	Signifikan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)	-12.28629	0.0000	Signifikan
Dana Keistimewaan (DAIS)	12.36650	0.0003	
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	-0.049520	0.3719	Tidak Signifikan
Penanaman Modal Asing (PMA)	0.902754	0.0097	Signifikan
Tenaga Kerja (TK)	0.001969	0.7952	Signifikan

Sumber: Diolah Dengan eviews 12

Berdasarkan tabel 4.5.2 maka didapatkan hasil uji t pada penelitian ini sebagai berikut:

1. **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Hasil dari uji t menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0000. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari Tingkat alpha sebesar 5% atau 0.05 sehingga menolak H_0 dan memiliki koefisien sebesar 18.05359 yang berarti bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di D.I Yogyakarta. Pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah ketika Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik 1% maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 18.05359%.

2. **Pengaruh Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)**

Hasil dari uji t menunjukkan bahwa variabel Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) memiliki nilai probabilitas 0.0000. Artinya nilai probabilitas lebih kecil dari Tingkat alpha sebesar 5% atau 0.05 sehingga menolak H_0 dan memiliki koefisien sebesar -12.28629. Jadi pada variabel ransfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di D.I Yogyakarta.

3. **Pengaruh Dana Keistimewaan (DAIS)**

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Dana Keistimewaan (DAIS) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0003. Artinya nilai probabilitas nilai tersebut lebih kecil dari Tingkat alpha sebesar 5% atau 0.05 sehingga menolah H_0 dan memiliki koefisien sebesar 12.36650 yang berarti bahwa variabel Dana Keistimewaan (DAIS) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di D.I Yogyakarta. Ketika Dana Keistimewaan (DAIS) naik 1% maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 12.36650%.

4. **Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)**

Hasil dari uji t menunjukkan bahwa variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.3719. Artinya nilai probabilitas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) lebih besar dari tingkat alpha sebesar 5%

atau 0.05 sehingga gagal menolak H_0 dan memiliki koefisien sebesar -0.049520. jadi pada variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di D.I Yogyakarta.

5. **Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA)**

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Penanaman Modal Asing (PMA)memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0097. Artinya nilai probabilitas nilai tersebut lebih kecil dari Tingkat alpha sebesar 5% atau 0.05 sehingga menolak H_0 dan memiliki koefisien sebesar 0.902754 yang berarti bahwa variabel Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di D.I Yogyakarta. Ketika Penanaman Modal Asing (PMA) naik 1% maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.902754%.

6. **Pengaruh Tenaga Kerja**

Hasil dari uji t menunjukkan bahwa variabel Tenaga Kerja memiliki nilai probabilitas sebesar 0.7952. Artinya nilai probabilitas Tenaga Kerja lebih besar dari tingkat alpha sebesar 5% atau 0.05 sehingga gagal menolak H_0 dan memiliki koefisien sebesar 0.001969 yang berarti bahwa variabel Tenaga Kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di D.I Yogyakarta. Ketika Tenaga Kerja naik 1% maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.001969%.

4.5.3 Pengukuran Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui sebesar besar variabel independent penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), Dana Keistimewaan (DAIS), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), dan Tenaga Kerja (TK) mampu menjelaskan variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil dari regresi common effect model maka didapatkan hasil uji koefisien determinasi sebagai berikut:

Tabel 4.9 Hasil Koefisien Determinasi

Variabel	R-squared
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0.931039
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)	

Variabel	R-squared
Dana Keistimewaan (DAIS)	
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	
Penanaman Modal Asing (PMA)	
Tenaga Kerja (TK)	

Sumber: Diolah Dengan eviews 12

4.6 Analisis Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil uji parsial atau t-statistik dari vaiabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah terdapat pengaruh yang signifikan dan positif terhdap pertumbuhan ekonomi di D.I Yogyakarta. Hasil ini sesuai dengan hipotesis. Pada table 4.5.2 dapat dilihat koefisien Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 18.05359 ini artinya ketika tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik 1% maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 18.05359%. Hal ini dipengaruhi oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian Erlinda Siagian yang menunjukkan bahwa PAD berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Siagian menjelaskan bahwa PAD merupakan akumulasi dari berbagai pos penerimaan, yaitu pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan retribusi daerah, serta pos penerimaan non-pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah. Ketika pemanfaatan PAD dilakukan secara optimal dan diikuti dengan peningkatan PAD itu sendiri, maka pertumbuhan ekonomi daerah akan mengalami peningkatan yang signifikan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Chindy Febry Rori (2016) di Provinsi Sulawesi Utara yang mengkonfirmasi hubungan positif antara PAD dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian Rori menunjukkan koefisien positif yang mengindikasikan bahwa setiap kenaikan PAD akan berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, dengan menegaskan bahwa PAD merupakan sumber pembiayaan daerah yang strategis dan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Selain itu, penelitian Anita (2020) di Kota Surakarta memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi, dimana daerah dengan pertumbuhan PAD yang positif memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk mengalami peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sebagai indikator utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Konsistensi temuan penelitian ini dengan studi-studi terdahulu memperkuat argumen bahwa PAD memainkan peran krusial sebagai instrumen fiskal daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, yang sejalan dengan teori desentralisasi fiskal yang menekankan pentingnya kemandirian keuangan daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal. Magnitude koefisien PAD yang relatif besar (18,05359) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa D.I. Yogyakarta memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya melalui optimalisasi PAD, sehingga pemerintah daerah perlu terus mengoptimalkan potensi PAD melalui peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, pengembangan sumber-sumber PAD baru yang potensial, dan peningkatan kinerja perusahaan daerah sebagai kontributor PAD.

4.6.2 Pengaruh Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien sebesar -12.28629 dan probabilitas 0.0000. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan hasil uji statistik dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, hipotesis kedua DITERIMA karena TKDD terbukti berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (p-value = 0.0000 < $\alpha = 0.05$), meskipun arah pengaruhnya negatif. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan di Sulawesi Selatan, dimana dana desa menunjukkan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien -0.281070 dan nilai signifikansi 0.067. Kedua penelitian ini mengkonfirmasi adanya fenomena paradoks dimana peningkatan transfer dana dari pemerintah pusat justru tidak mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sebagaimana yang diharapkan berdasarkan teori Wagner yang menyatakan hubungan positif antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi.

Hasil negatif ini mengindikasikan adanya permasalahan struktural dalam efektivitas penggunaan dana transfer atau kemungkinan terjadinya dutch disease effect dimana ketergantungan pada transfer pusat justru menghambat inisiatif lokal untuk mengembangkan sumber pendapatan asli daerah. Data menunjukkan bahwa TKDD menjadi penyumbang terbesar dalam struktur pendapatan daerah, terutama di wilayah dengan kapasitas fiskal terbatas seperti Kulon Progo dan Gunungkidul, dimana TKDD mencapai Rp1.198,89 miliar dibandingkan PAD yang hanya Rp237,88 miliar pada tahun 2019. Ketergantungan yang tinggi ini dapat menciptakan moral hazard dimana pemerintah daerah lebih fokus pada optimalisasi transfer daripada mengembangkan potensi ekonomi lokal. Penelitian di Sulawesi Selatan milik Andi samsir (2017) juga menunjukkan bahwa meskipun dana desa mengalami peningkatan signifikan selama 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi justru mengalami penurunan di bawah tujuh persen pada tahun 2019, yang memperkuat argumen bahwa efektivitas penggunaan dana transfer masih menjadi tantangan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

4.6.3 Pengaruh Dana Keistimewaan (DAIS) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Keistimewaan (DAIS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien sebesar 12.36650 dan probabilitas 0.0003. Hasil ini sesuai dengan hipotesis. Setiap peningkatan DAIS sebesar 1% akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 12.37%. Berdasarkan hasil uji statistik dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, hipotesis ketiga DITERIMA karena DAIS terbukti berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (p-value = $0.0003 < \alpha = 0.05$). Temuan ini sejalan dengan penelitian Rosyid Nur Anggara Putra dan Muh. Rudi Nugroho (2019) yang menemukan bahwa setelah implementasi DAIS pada periode 2013-2015, pertumbuhan ekonomi di D.I. Yogyakarta meningkat signifikan sebesar 0,98%. Penelitian tersebut juga mengkonfirmasi transformasi yang signifikan dimana sebelumnya dana penyesuaian memiliki pengaruh negatif, namun setelah implementasi DAIS pengaruhnya menjadi positif dan signifikan, menunjukkan efektivitas DAIS dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah secara nyata dan mempercepat efek multiplier.

Pengaruh positif DAIS terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui keunikan alokasi dana yang disesuaikan dengan karakteristik khusus D.I. Yogyakarta sebagai daerah istimewa. Dana keistimewaan memungkinkan pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor-sektor strategis seperti pariwisata, pendidikan, dan kebudayaan yang menjadi keunggulan komparatif daerah. Berbeda dengan dana transfer umum lainnya, DAIS memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam penggunaannya sehingga dapat diarahkan pada program-program yang memiliki dampak langsung terhadap perekonomian lokal. Penelitian Putra dan Nugroho (2019) memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa DAIS tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga menghasilkan distribusi pendapatan per kapita yang lebih merata di tingkat kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta. Keberhasilan DAIS juga didukung oleh penelitian Faarida (2024) yang menggunakan data terbaru periode 2017-2022, menunjukkan bahwa DAIS merupakan bagian penting dalam alokasi fiskal yang mempengaruhi indikator sosial-ekonomi, sehingga mencerminkan efektivitas sistem desentralisasi fiskal yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi spesifik daerah istimewa.

4.6.4 Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien sebesar -0.049520 dan probabilitas 0.3719. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan hasil uji statistik dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, hipotesis keempat DITOLAK karena PMDN tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (p-value = 0.3719 > $\alpha = 0.05$). Temuan ini didukung oleh konsistensi hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan pola serupa. Penelitian Auliya Ramadan (2024) di Provinsi Aceh menemukan bahwa PMDN memiliki nilai probabilitas 0.9494 > 0.05 dengan koefisien negatif sebesar -0.001456, sehingga PMDN tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan bahkan menunjukkan hubungan yang bersifat invers. Hasil yang konsisten juga ditunjukkan oleh penelitian Muhamad Ferdy

Firmansyah (2023) yang menganalisis beberapa provinsi di Indonesia dan menemukan bahwa PMDN tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, berbeda dengan Penanaman Modal Luar Negeri (PMLN) yang justru berpengaruh lebih kuat.

Ketidaksignifikanan pengaruh PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui beberapa faktor struktural dan operasional. Pertama, investasi PMDN mungkin belum mencapai skala ekonomis yang diperlukan untuk memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi agregat, terutama jika sebagian besar investasi tersebut masih dalam tahap awal atau bersifat padat modal dengan efek multiplier yang terbatas. Kedua, seperti yang dijelaskan dalam penelitian Ramadan (2024), pengaruh PMDN yang bersifat invers mengindikasikan adanya kemungkinan crowding out effect dimana investasi domestik justru menggantikan aktivitas ekonomi yang sudah ada tanpa menciptakan nilai tambah baru yang signifikan. Ketiga, karakteristik struktur ekonomi D.I. Yogyakarta yang didominasi oleh sektor jasa dan perdagangan mungkin memerlukan jenis investasi yang berbeda dari pola PMDN konvensional yang lebih fokus pada sektor manufaktur. Temuan ini mengindikasikan perlunya evaluasi lebih mendalam terhadap strategi penanaman modal domestik agar dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sesuai dengan karakteristik dan keunggulan komparatif masing-masing wilayah.

4.6.5 Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien sebesar 0.902754 dan probabilitas 0.0097. Hasil ini sesuai dengan hipotesis. Berdasarkan hasil uji statistik dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, hipotesis kelima DITERIMA karena PMA terbukti berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (p-value = 0.0097 < α = 0.05). Setiap peningkatan PMA sebesar 1% akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.90%. Temuan ini sejalan dengan penelitian Engelica (2025) yang menggunakan data periode 1995-2023 di Indonesia dan menyimpulkan bahwa Foreign Direct Investment (FDI) atau PMA secara positif dan signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Konsistensi hasil juga ditunjukkan oleh studi literature review Kusdianti Fatimah dkk. (2022) yang secara

konsisten menemukan bahwa peningkatan PMA berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi, terutama di negara-negara berkembang dimana kemajuan ekonomi salah satunya didorong oleh peningkatan investasi asing.

Pengaruh positif PMA terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui beberapa mekanisme transmisi yang telah terbukti secara empiris. Pertama, PMA meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi ekonomi melalui injeksi modal yang langsung berkontribusi terhadap pembentukan modal tetap bruto dan ekspansi aktivitas ekonomi. Kedua, sebagaimana dijelaskan oleh Engelica (2025), PMA mendorong produktivitas melalui transfer teknologi dan peningkatan kapasitas produksi nasional, yang memungkinkan adopsi teknologi dan praktik manajemen yang lebih modern. Ketiga, meskipun koefisien PMA (0.90%) relatif kecil dibandingkan dengan PAD dan DAIS, kontribusinya tetap signifikan secara statistik dan mencerminkan efek spillover yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Keberhasilan PMA dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di D.I. Yogyakarta juga mengkonfirmasi kontras yang jelas dengan PMDN yang tidak signifikan, menunjukkan bahwa investasi asing membawa keunggulan komparatif berupa akses teknologi, jaringan pemasaran internasional, dan standar kualitas yang lebih tinggi dibandingkan investasi domestik konvensional.

4.6.6 Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga kerja memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien sebesar 0.001969 dan probabilitas 0.7952. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan Tenaga Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan hasil uji statistik dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, hipotesis keenam DITOLAK karena tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (p-value = $0.7952 > \alpha = 0.05$). Meskipun arah pengaruhnya positif sesuai dengan teori ekonomi, magnitude dan signifikansinya sangat rendah. Temuan ini didukung oleh konsistensi hasil penelitian terdahulu di berbagai wilayah Indonesia. Penelitian Putri (2025) di Kota Kendari periode 2021-2023 menemukan bahwa tenaga kerja berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai R^2 yang rendah (0.318). Hasil serupa juga ditunjukkan oleh

penelitian Rohadin (2025) di Provinsi Jawa Barat yang menemukan bahwa struktur tenaga kerja dan tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, mengindikasikan bahwa peningkatan atau komposisi tenaga kerja tidak selalu diikuti dengan peningkatan output ekonomi yang bermakna secara statistik.

Ketidaksignifikanan pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui beberapa faktor struktural yang kompleks. Pertama, seperti yang dijelaskan dalam penelitian Putri (2025), terdapat keterbatasan model dan variabel lain di luar tenaga kerja yang lebih dominan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi, sehingga kontribusi tenaga kerja secara statistik tidak tampak signifikan. Kedua, fenomena ini mengindikasikan adanya masalah produktivitas tenaga kerja dimana penambahan jumlah pekerja tidak otomatis meningkatkan output ekonomi jika tidak disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, teknologi, dan efisiensi proses produksi. Ketiga, karakteristik struktur ekonomi D.I. Yogyakarta yang didominasi sektor jasa dan perdagangan mungkin memiliki elastisitas tenaga kerja yang berbeda dibandingkan sektor manufaktur yang lebih padat karya. Temuan ini sejalan dengan paradigma modern yang menekankan pentingnya kualitas tenaga kerja (human capital) dibandingkan kuantitas semata, dimana pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh produktivitas dan inovasi daripada sekadar penambahan jumlah pekerja, sehingga mengindikasikan perlunya fokus pada peningkatan keterampilan dan kapasitas tenaga kerja untuk mengoptimalkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penilitian yang dilakukan maka muncul beberapa Kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), Dana Keistimewaan (DAIS), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), dan Tenaga Kerja (TK) berpengaruh secara bersama – sama terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi D.I Yogyakarta pada tahun 2015 – 2024.
2. Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini didapatkan Kesimpulan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Keistimewaan (DAIS), Penanaman Modal Asing (PMA), dan Tenaga Kerja (TK) berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi D.I Yogyakarta pada tahun 2015 – 2024, sementara itu Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) berpengaruh secara negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi D.I Yogyakarta pada tahun 2015 – 2024. Sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi D.I. Yogyakarta pada Tahun 2015 – 2024.

5.2 Saran

Beberapa saran terkait dengan hasil penelitian ini adalah :

1. Untuk pemerintah daerah di Provinsi D.I Yogyakarta, dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, hendaknya lebih memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan sektor unggulan, peningkatan efisiensi pengelolaan pajak daerah, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini penting mengingat PAD memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Dana Keistimewaan (DAIS) terbukti berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di D.I Yogyakarta. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa alokasi dan penggunaan dana ini tepat sasaran, terutama pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, pariwisata, dan budaya yang memiliki potensi penggerak ekonomi.
3. Penanaman Modal Asing (PMA) memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, pemerintah daerah diharapkan membuat kebijakan yang mendorong masuknya investasi asing, seperti kemudahan perizinan, penyediaan infrastruktur penunjang, dan kepastian hukum agar iklim investasi di D.I Yogyakarta semakin kompetitif.
4. Tenaga kerja juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya melalui pelatihan, pendidikan vokasi, dan peningkatan produktivitas kerja. Pemerintah juga perlu mendorong terciptanya lapangan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar.
5. Mengingat Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, maka perlu adanya evaluasi dan pengawasan dalam penyaluran dan penggunaannya. Pemerintah daerah perlu mengarahkan TKDD pada program yang benar-benar berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.
6. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tidak menunjukkan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh investor domestik. Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang lebih mendukung pertumbuhan PMDN melalui insentif fiskal dan kemudahan akses permodalan.

DAFTAR PUSTAKA

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Economic Development: 9th Edition* (Vol. 9). United Kingdom: Pearson Education Limited.

Saad, W., & Kalakech, K. (2009). *The Nature of Government Expenditure and its Impact on Sustainable Economic Growth.* Lebanese University, Departement of Economics. Hadath: Middle Eastern Finance and Economics.

Agus, P. F. (2014). *Analisis Pengaruh Investasi dan Ketenagakerjaan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Kabupaten Pelalawan.* Universitas Riau, Faculty of Economic. Pekanbaru: JOM Fekon.

Pujoalwanto, B. (2014). *Perekonomian Indonesia: Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris.* Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, Indonesia: Graha Ilmu.

Hasim, R. A. (2016). *Politik Hukum Pengaturan Sultan Ground Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 Tentang Keistimewaan Yogyakarta dan Hukum Tanah Nasional.* Universitas Brawijaya, Department of Law. Malang: Arena Hukum.

Ramayani, C. (2012). *Analisis Produktivitas Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.* STKIP PGRI Padang, Department of Economy. Padang: Jurnal Kajian Ekonomi.

Fitriani, N. (2018). *Pengaruh Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DIY Tahun 2007-2015.* Universitas Islam Indonesia, Department of Economy. Yogyakarta: Jurnal Pendidikan dan Ekonomi.

Sukirno, S. (2011). *Makroekonomi Teori Pengantar: Edisi Ketiga.* Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers.

Adisasmita, R. (2013). *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi: Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah.* Yogyakarta, D.I Yogyakarta, Indonesia: Graha Ilmu.

Hasan, M., & Azis, M. (2018). *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal.* Malang, Jawa Timur, Indonesia: CV. Nur Lina.

Subandi. (2019). *Ekonomi Pembangunan.* Bandung, Jawa Barat, Indonesia: Alfa Beta.

Badrudin, R. (2011). *Effect of Fiscal Decentralization on Capital Expenditure, Growth, and Welfare.* STIE YKPN Yogyakarta, Department of Economy. Yogyakarta: Economic Journal of Emerging Markets.

Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* Malang, Jawa Timur, Indonesia: UB Press.

Nasir, M. S. (2019). *Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah.* Universitas Diponegoro, Department of Economy. Semarang: Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan.

Setiya, T., Waluyo, B., Pribadi, Y., Puspitarini, I., Ariutama, I. A., Anggiano U., B. A., & Saputra, A. H. (2021). *APBN in Depth: Mengulik APBN Lebih Dalam.* Tangerang Selatan, Banten, Indonesia: Politeknik Keuangan STAN.

Kholik, N. (2022). *Penentuan Dana Keistimewaan Yogyakarta antara Pemerintah Pusat Pusat dengan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012.* Universitas Ahmad Dahlan, Department of Law. Yogyakarta: Ahmad Dahlan Legal Perspective.

Bakari, S. (2018). *The Impact of Domestic Investment on Economic Growth: New Policy Analysis from Algeria.* University of Tunis El Manar, Department of Economic Science. Tunisia: Bulletin of Economic Theory and Analysis.

Asiyan, S. (2013). *Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur.* Universitas Negeri Surabaya, Department of Economy. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.

Adi, H. A., & Syahlina. (2020). *Analisis: Pengaruh Penanaman Modal Luar Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) di Provinsi Jambi.* Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Department of Economy. Kab. Serang: Jurnal Ekonomi-Qu.

Mankiw, M. G. (2003). *Teori Makroekonomi: Edisi Kelima.* Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Erlangga.

Astuti, W. A., Hidayat, M., & Darwin, R. (2017). *Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pelalawan.* Universitas Muhammadiyah Riau, Department of Economy. Pekanbaru: Jurnal Akuntansi dan Ekonomika.

Widayanti, H. W., Laut, L. T., & Destiningsih, R. (2019). *Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan dan Jumlah Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang Tahun 1996-2017*. Universitas Tidar, Department of Economy. Magelang: DINAMIC: Directory Journal of Economic.

Swastika, I. Y. (2024). *Pengaruh Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2017-2022*. Warmadewa Economic Development Journal (WEDJ).

Kuncoro, M. (2003). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta, DI Yogyakarta, Indonesia: Unit Penerbit dan Percetakan, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

Ihsan, S. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Pembiayaan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat*. Universitas Gunung Rinjani, Department of Economy. Lombok Timur: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah (ALIANSI).

Salsabila, T. U. (2024). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal di Indonesia Tahun 2018-2022*. Universitas Tidar, Department of Accountancy. Magelang: Universitas Tidar.

Supiyanti. (2023). *Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Belanja Modal dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Department of Economy. Makassar: Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar.

Shafwah, R., & Zakaria, J. (2019). *Pengaruh Inflasi, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar Tahun 2008-2017*. Universitas Muslim Indonesia, Department of Economy. Makassar: Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi.

Mulyani, E. S., Sudarman, & Astuti, R. F. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2001-2020*. Universitas Mulawarman, Department of Economy. Samarinda: Educational Studies: Conference Series.

Putra, H. N., Pratiwi, L. I., Al-Sakinnah, P. S., & Safari, M. E. (2024). *Pengaruh PAD, TKDD Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Jombang*.

Universitas Darul 'Ulum Jombang, Department of Business and Management. Jombang: Economic and Business Management International Journal (EABMIJ).

Wahyuni, A. S. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta.* STEI, Department of Economy. Jakarta: Jurnal STEI Ekonomi.

Al Akbar, A. F. (2022). *Analisis Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten Pada Periode Tahun 2017-2020.* Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Department of Economic Development. Kab. Serang: POPULER: Jurnal Penelitian Mahasiswa.

Rahmi, F. (2023). *Pengaruh Penanaman Modal Asing, Pendapatan Asli Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.* Universitas Negeri Medan, Department of Economy. Medan: Seminar Nasional LPPM UMMAT.

Aji, A. O. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di D.I. Yogyakarta.* Universitas Islam Indonesia, Department of Economy. Kab. Sleman: Universitas Islam Indonesia.

Dhyatmika, K. W. (2013). *Analisis Ketimpangan Pembanguna Provinsi Banten Pasca Pemekaran.* Semarang: Diponegoro Journal of Economics.

Aulia, A. R., & Yulianti, A. L. (2019). *Pengaruh City Branding "A Land of Harmony" Terhadap Minat Berkunjung dan Keputusan Berkunjung Ke Puncak, Kabupaten Bogor.* Universitas Telkom, Department of Economy and Management. Bandung: JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi & Akuntansi).

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Yogyakarta, DI Yogyakarta, Indonesia: ALFABETA.

Badrudin, R. (2011). *Effect of Fiscal Decentralization on Capital Expenditure, Growth, and Welfare.* STIE YKPN Yogyakarta, Department of Economy. Yogyakarta: Economic Journal of Emerging Markets.

Juwari, Susilowati, D., & Sitinjak, C. A. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Pengembanga, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Kota*

Balikpapan. Universitas Balikpapan, Department of Economy. Balikpapan: Jurnal FEM UNIBA.

Ramayanti, C. (2012). *Analisis Produktivitas Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. STKIP PGRI Padang. Padang: Jurnal Kajian Ekonomi.

Ghozali. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Edisi Ke 4)*. Semarang, Jawa Tengah, Indonesia: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Data Penelitian

Kota	Tahun	pert EK	PAD	TKDD
KulonProgo	2015	6281,90	170,82	730,00
Bantul	2015	15588,52	390,62	1041,84
GunungKidul	2015	11152,36	196,10	978,31
Sleman	2015	28098,01	643,13	1052,11
Kota Yogyakarta	2015	22393,01	510,55	652,75
KulonProgo	2016	6580,68	180,27	1057,30
Bantul	2016	16375,51	404,45	1431,27
GunungKidul	2016	11696,16	206,28	1344,95
Sleman	2016	29563,38	717,15	1389,68
Kota Yogyakarta	2016	23536,29	540,50	915,86
KulonProgo	2017	6973,41	249,69	993,22
Bantul	2017	17209,87	494,18	1418,95
GunungKidul	2017	12281,56	271,37	1411,41
Sleman	2017	31140,59	826,64	1469,20
Kota Yogyakarta	2017	24768,43	657,05	871,36
KulonProgo	2018	7728,41	211,05	1112,50
Bantul	2018	18150,88	462,65	1468,78
GunungKidul	2018	12914,94	226,98	1391,37
Sleman	2018	33138,26	894,27	1501,41
Kota Yogyakarta	2018	26127,22	667,49	910,21
KulonProgo	2019	8770,75	237,88	1198,89
Bantul	2019	19155,27	505,93	1512,81
GunungKidul	2019	13605,07	254,81	1518,31
Sleman	2019	35286,51	972,05	1542,25
Kota Yogyakarta	2019	27685,29	689,05	911,07
KulonProgo	2020	8468,29	254,42	1018,06
Bantul	2020	18839,37	479,61	1352,14
GunungKidul	2020	13512,44	228,21	1298,90
Sleman	2020	33857,33	788,25	1345,44
Kota Yogyakarta	2020	27016,50	563,17	902,22
KulonProgo	2021	8838,14	307,15	1139,96
Bantul	2021	19781,89	491,67	1394,23
GunungKidul	2021	14230,14	236,37	1519,73
Sleman	2021	35755,93	803,68	1514,15
Kota Yogyakarta	2021	27409,76	598,12	884,85
KulonProgo	2022	9419,36	308,16	1045,39
Bantul	2022	20809,22	540,57	1469,25
GunungKidul	2022	14994,23	313,52	1474,38
Sleman	2022	37596,42	1061,06	1550,23
Kota Yogyakarta	2022	29863,00	725,58	968,20

Kota	Tahun	pert EK	PAD	TKDD
KulonProgo	2023	9951,95	324,05	1148,57
Bantul	2023	21861,77	587,44	1541,17
GunungKidul	2023	15749,22	277,32	1503,03
Sleman	2023	39508,68	2260,32	3145,62
Kota Yogyakarta	2023	31378,80	1610,69	1897,86
KulonProgo	2024	10426,23	329,33	1018,89
Bantul	2024	22964,66	602,89	1662,84
GunungKidul	2024	16506,42	261,33	1375,22
Sleman	2024	41559,54	1088,44	1553,24
Kota Yogyakarta	2024	32964,35	768,47	883,01

Lampiran 1: Data Penelitian (lanjutan)

Kota	Tahun	DAIS	PMDN	PMA	TK
KulonProgo	2015	1243,07	494,70	562,48	232190
Bantul	2015	1933,30	268,01	343,26	495235
GunungKidul	2015	1586,00	35,50	136,08	386458
Sleman	2015	2328,75	1431,04	3009,70	567286
Kota Yogyakarta	2015	1539,70	1722,41	3220,22	210049
KulonProgo	2016	1406,49	523,95	562,77	252691
Bantul	2016	2016,54	308,25	435,04	517837
GunungKidul	2016	1651,55	43,85	140,64	419165
Sleman	2016	2455,45	1831,97	3112,54	621764
Kota Yogyakarta	2016	1665,42	1814,80	3303,85	230943
KulonProgo	2017	1430,46	568,62	635,33	239542
Bantul	2017	2076,74	345,33	537,65	541512
GunungKidul	2017	1860,23	97,08	147,84	422391
Sleman	2017	2489,60	1930,83	3283,86	636132
Kota Yogyakarta	2017	1484,92	1875,58	3431,85	213591
KulonProgo	2018	1481,01	50937,78	688,74	249186
Bantul	2018	2165,65	409,82	622,21	561731
GunungKidul	2018	1772,31	110,73	149,20	437238
Sleman	2018	2580,09	3364,30	3367,62	645596
Kota Yogyakarta	2018	1652,73	190,53	4298,74	224641
KulonProgo	2019	1671,66	9948,56	702,84	252018
Bantul	2019	2283,59	520,62	642,29	561529
GunungKidul	2019	2132,22	161,60	176,73	439564
Sleman	2019	2777,00	4159,52	3474,80	649763
Kota Yogyakarta	2019	1734,59	2457,70	4349,30	231876
KulonProgo	2020	1500,04	786,40	731,55	259421
Bantul	2020	2093,72	552,05	668,36	585160
GunungKidul	2020	1775,06	192,86	177,38	389444
Sleman	2020	2532,17	4710,52	3548,00	667823

Kota	Tahun	DAIS	PMDN	PMA	TK
Kota Yogyakarta	2020	1517,60	2689,56	4360,67	224468
KulonProgo	2021	1499,99	12286,81	737,75	259044
Bantul	2021	2226,59	652,09	680,99	571268
GunungKidul	2021	1918,21	480,61	180,24	458886
Sleman	2021	2714,31	6478,69	3700,35	701123
Kota Yogyakarta	2021	1691,97	2794,45	4504,25	238202
KulonProgo	2022	1531,20	321,44	1002,03	272081
Bantul	2022	2272,47	397,61	179,19	601408
GunungKidul	2022	2006,45	132,52	25,31	453646
Sleman	2022	3040,47	1092,77	139,50	665512
Kota Yogyakarta	2022	1826,80	330,67	288,34	248484
KulonProgo	2023	1587,74	35,68	206,70	262813
Bantul	2023	2237,15	133,86	533,44	579798
GunungKidul	2023	1868,12	5,18	187,08	459186
Sleman	2023	2922,67	235,33	3412,66	627667
Kota Yogyakarta	2023	1853,32	270,87	655,61	210246
KulonProgo	2024	1641,81	170,02	22,00	275589
Bantul	2024	2476,23	605,01	122,11	585625
GunungKidul	2024	1891,61	58,76	24,86	461326
Sleman	2024	3035,09	2030,20	261,24	656481
Kota Yogyakarta	2024	1918,93	766,26	101,44	479337

Lampiran 2: Common Effect

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 06/18/25 Time: 16:40
Sample: 2015 2024
Periods included: 10
Cross-sections included: 5
Total panel (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	101.3492	3212.597	0.031547	0.9750
PAD	18.05359	2.273770	7.939936	0.0000
TKDD	-12.28629	1.800738	-6.822921	0.0000
DAIS	12.36650	3.167850	3.903751	0.0003
PMDN	-0.049520	0.054878	-0.902360	0.3719
PMA	0.902754	0.333266	2.708810	0.0097
TK	0.001969	0.007540	0.261118	0.7952

Root MSE	2563.891	R-squared	0.931039
Mean dependent var	20589.32	Adjusted R-squared	0.921417
S.D. dependent var	9862.468	S.E. of regression	2764.714
Akaike info criterion	18.81644	Sum squared resid	3.29E+08
Schwarz criterion	19.08412	Log likelihood	-463.4110
Hannan-Quinn criter.	18.91837	F-statistic	96.75725
Durbin-Watson stat	0.846176	Prob(F-statistic)	0.000000

Lampiran 3: Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.188657	(9,34)	0.3335
Cross-section Chi-square	13.678316	9	0.1342

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: PERT_EK
Method: Panel Least Squares
Date: 08/07/25 Time: 21:20
Sample: 1 50
Periods included: 5
Cross-sections included: 10
Total panel (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	101.3492	3212.597	0.031547	0.9750
PAD	18.05359	2.273770	7.939936	0.0000
TKDD	-12.28629	1.800738	-6.822921	0.0000
DAIS	12.36650	3.167850	3.903751	0.0003
PMDN	-0.049520	0.054878	-0.902360	0.3719
PMA	0.902754	0.333266	2.708810	0.0097
TK	0.001969	0.007540	0.261118	0.7952

R-squared	0.931039	Mean dependent var	20589.32
Adjusted R-squared	0.921417	S.D. dependent var	9862.468
S.E. of regression	2764.714	Akaike info criterion	18.81644
Sum squared resid	3.29E+08	Schwarz criterion	19.08412
Log likelihood	-463.4110	Hannan-Quinn criter.	18.91837
F-statistic	96.75725	Durbin-Watson stat	2.087074
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 4: Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	10.266520	6	0.1139

** WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero.

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PAD	18.477719	18.053590	2.344525	0.7818
TKDD	-13.775257	-12.286291	2.090862	0.3031
DAIS	10.318897	12.366499	5.605022	0.3871
PMDN	-0.061937	-0.049520	0.000618	0.6175
PMA	1.082966	0.902754	0.082902	0.5314
TK	0.007472	0.001969	0.000026	0.2828

Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: PERT_EK
Method: Panel Least Squares
Date: 08/07/25 Time: 21:23
Sample: 1 50
Periods included: 5
Cross-sections included: 10
Total panel (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3269.068	3921.521	0.833622	0.4103
PAD	18.47772	2.705211	6.830418	0.0000
TKDD	-13.77526	2.282617	-6.034852	0.0000
DAIS	10.31890	3.906289	2.641611	0.0124
PMDN	-0.061937	0.059292	-1.044612	0.3036
PMA	1.082966	0.435602	2.486136	0.0180
TK	0.007472	0.008997	0.830539	0.4120

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.947544	Mean dependent var	20589.32
Adjusted R-squared	0.924402	S.D. dependent var	9862.468
S.E. of regression	2711.695	Akaike info criterion	18.90287
Sum squared resid	2.50E+08	Schwarz criterion	19.51472
Log likelihood	-456.5718	Hannan-Quinn criter.	19.13587
F-statistic	40.94433	Durbin-Watson stat	2.774694
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 5: Uji LM

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	6.16E-05 (0.9937)	60.95192 (0.0000)	60.95198 (0.0000)
Honda	0.007849 (0.4969)	7.807171 (0.0000)	5.526053 (0.0000)
King-Wu	0.007849 (0.4969)	7.807171 (0.0000)	6.500313 (0.0000)
Standardized Honda	0.351918 (0.3625)	13.39691 (0.0000)	4.500970 (0.0000)
Standardized King-Wu	0.351918 (0.3625)	13.39691 (0.0000)	6.529480 (0.0000)
Gourieroux, et al.	--	--	60.95198 (0.0000)

Lampiran 6: Uji Multikolinearitas

Correlation						
Variabel	**PAD**	**TKDD**	**DAIS**	**PMDN**	**PMA**	**TK**
PAD	1.000000	0.638012	0.637027	-0.106426	0.423604	0.356900
TKDD	0.638012	1.000000	0.677229	-0.091349	-0.088867	0.603929
DAIS	0.637027	0.677229	1.000000	-0.131662	0.146209	0.899004
PMDN	-0.106426	-0.091349	-0.131662	1.000000	0.046338	-0.158060
PMA	0.423604	-0.088867	0.146209	0.046338	1.000000	-0.027076
TK	0.356900	0.603929	0.899004	-0.158060	-0.027076	1.000000

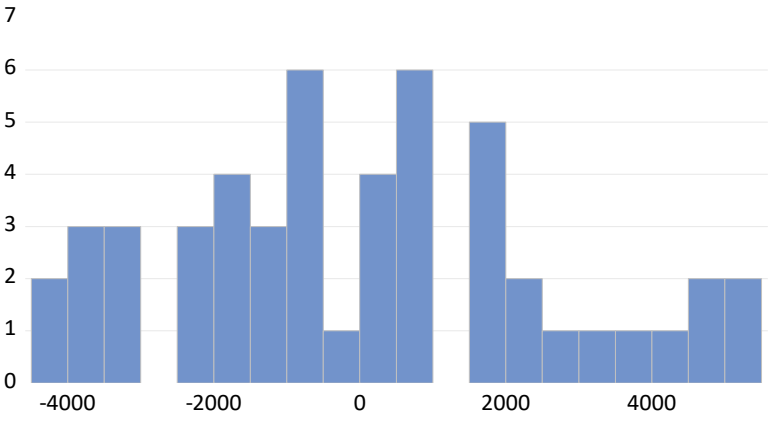
Lampiran 7: Uji Heterokedastisitas

Dependent Variable: ABS(RESID)
Method: Panel Least Squares
Date: 06/18/25 Time: 16:31
Sample: 2015 2024
Periods included: 10
Cross-sections included: 5
Total panel (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6088.647	1610.364	3.780914	0.0005
PAD	2.006211	1.139763	1.760200	0.0855
TKDD	-0.971673	0.902648	-1.076470	0.2877
DAIS	-2.127525	1.587934	-1.339807	0.1873
PMDN	-0.035846	0.027509	-1.303082	0.1995
PMA	-0.323580	0.167055	-1.936973	0.0593
TK	0.002122	0.003779	0.561466	0.5774

Root MSE	1285.190	R-squared	0.228604
Mean dependent var	2105.311	Adjusted R-squared	0.120967
S.D. dependent var	1478.140	S.E. of regression	1385.856
Akaike info criterion	17.43520	Sum squared resid	82585658
Schwarz criterion	17.70288	Log likelihood	-428.8800
Hannan-Quinn criter.	17.53714	F-statistic	2.123848
Durbin-Watson stat	1.952520	Prob(F-statistic)	0.069973

Lampiran 8: Uji Heterokedastisitas



Series: Standardized Residuals
Sample 2015 2024
Observations 50

Mean	-1.18e-12
Median	-127.7137
Maximum	5233.675
Minimum	-4247.194
Std. Dev.	2589.921
Skewness	0.294452
Kurtosis	2.374067
Jarque-Bera	1.538747
Probability	0.463303